

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMANFAATAN PEMBIAYAAN
PADA SEKTOR PERTANIAN DAN PENDAPATAN USAHATANI PADI
DI KSPPS BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL
CABANG KOTA GAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

(Skripsi)

Oleh

Eliza Nur Aini
2114131019



**JURUSAN AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF FINANCING UTILIZATION IN THE AGRICULTURAL SECTOR AND RICE FARMING INCOME IN KSPPS BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL KOTA GAJAH BRANCH, CENTRAL LAMPUNG REGENCY

By

ELIZA NUR AINI

This study aims to analyze: (1) the effectiveness of financing utilization, (2) farm income, (3) the effect of the effectiveness of financing utilization and types of financing on rice farming income, and (4) the implementation of profit sharing. This study was conducted at KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Branch of Kota Gajah Regency, Central Lampung using a case study method. The number of samples in this study was 47 respondents in mudharabah financing and 45 respondents in musyarakah financing. The analysis method used in this study was qualitative and quantitative descriptive analysis. The results of the analysis showed that the effectiveness of financing utilization in the agricultural sector at KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Branch of Kota Gajah was classified as effective to very effective. The average utilization of financing reached 80.7 percent in mudharabah financing and 79.8 percent in musyarakah financing. The income of MT 1 rice farming business from cash costs on mudharabah financing is IDR22,224,128.01 per hectare and income from cash costs on musyarakah financing is IDR22,972,311.67 per hectare with a rice production R/C value of more than 1, meaning that the farming business is profitable to run. The effectiveness of the utilization of agricultural sector financing has a positive effect on rice farming business income, while the type of financing does not affect rice farming business income. The implementation of profit sharing on mudharabah and musyarakah financing at KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas, Kota Gajah Branch, runs in accordance with the Standard Operating Procedure (SOP), but faces challenges in the accuracy of reporting member income.

Keywords: financing effectiveness, income, sharia cooperatives

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMANFAATAN PEMBIAYAAN PADA SEKTOR PERTANIAN DAN PENDAPATAN USAHATANI PADI DI KSPPS BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL CABANG KOTA GAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

ELIZA NUR AINI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) efektivitas pemanfaatan pembiayaan, (2) pendapatan usahatani, (3) pengaruh efektivitas pemanfaatan pembiayaan dan jenis pembiayaan terhadap pendapatan usahatani padi, dan (4) pelaksanaan bagi hasil. Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah dengan metode studi kasus. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 47 responden pada pembiayaan *mudharabah* dan 45 responden pada pembiayaan *musyarakah*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dan kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan pembiayaan pada sektor pertanian di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah tergolong efektif hingga sangat efektif. Rata-rata pemanfaatan pembiayaan mencapai 80,7 persen pada pembiayaan *mudharabah* dan 79,8 persen pada pembiayaan *musyarakah*. Pendapatan usahatani padi MT 1 atas biaya tunai pada pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp22.224.128,01 per hektar dan pendapatan atas biaya tunai pada pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp22.972.311,67 per hektar dengan nilai R/C produksi padi lebih dari 1, artinya usahatani tersebut menguntungkan untuk dijalankan. Efektivitas pemanfaatan pembiayaan sektor pertanian berpengaruh positif terhadap pendapatan usahatani padi, sedangkan jenis pembiayaan tidak berpengaruh terhadap pendapatan usahatani padi. Pelaksanaan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), namun menghadapi tantangan dalam akurasi pelaporan pendapatan anggota.

Kata kunci: efektivitas pembiayaan, koperasi syariah, pendapatan,

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMANFAATAN PEMBIAYAAN
PADA SEKTOR PERTANIAN DAN PENDAPATAN USAHATANI PADI
DI KSPPS BMT ASSYAFIYAH BERKAH NASIONAL
CABANG KOTA GAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Oleh

ELIZA NUR AINI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PERTANIAN**

Pada

**Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Lampung**



**JURUSAN AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

Judul

: **ANALISIS EFEKTIVITAS PEMANFAATAN
PEMBIAYAAN PADA SEKTOR PERTANIAN
DAN PENDAPATAN USAHATANI PADI
DI KSPPS BMT ASSYAFIYAH BERKAH
NASIONAL CABANG KOTA GAJAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nama Mahasiswa

: **Eliza Nur Aini**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2114131019

Program Studi

: Agribisnis

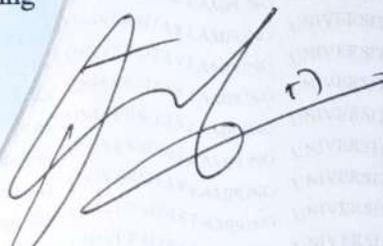
Fakultas

: Pertanian

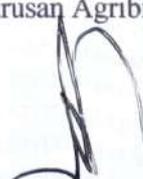


1. Komisi Pembimbing


Dr. Ir. Dyah Aring Hepiana Lestari, M.Si.
NIP. 196209181988032001


Dian Rahmalia, S.P., M.Si.
NIP. 198604102019032012

2. Ketua Jurusan Agribisnis


Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si.
NIP. 196910031994031004

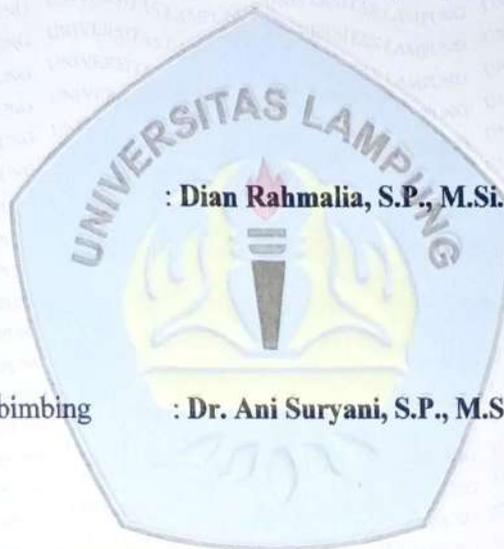
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ir. Dyah Aring Hepiana Lestari, M.Si.**

Sekretaris : **Dian Rahmalia, S.P., M.Si.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Ani Suryani, S.P., M.Sc.**



2. Dekan Fakultas Pertanian



Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.
NIP. 196411181989021002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 Juni 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Efektivitas Pemanfaatan Pembiayaan pada Sektor Pertanian dan Pendapatan Usahatani Padi di KSPPS BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atas karya penulisan lain dengan cara tidak sesuai dengan norma etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Pembimbing penulisan skripsi ini tidak berhak mempublikasikan sebagian atau seluruh skripsi ini pada jurnal ilmiah dengan mencantumkan nama saya sebagai salah satu penulisnya.
3. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Apabila kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Juni 2025

Pembuat Pernyataan



Eliza Nur Aini
NPM. 2114131019

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Lampung Timur tanggal 18 Maret 2003, dari pasangan Bapak Haryanto dan Ibu Sri Utami. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Taman Bogo pada Tahun 2009, pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Taman Bogo pada Tahun 2015, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Purbolinggo pada Tahun 2018, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Purbolinggo pada Tahun 2021. Penulis diterima di Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada Tahun 2021 jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Tahun 2021, penulis melakukan kegiatan *Homestay* di Desa Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tulang Bawang, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan selama 40 hari pada bulan Januari hingga Februari 2024. Selain itu, penulis mengikuti program MBKM Magang di PT Great Giant Pineapple Company di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah selama tiga bulan yaitu pada bulan September – November Tahun 2023. Penulis juga pernah menjadi asisten dosen untuk mata kuliah Kewirausahaan pada semester Ganjil 2024/2025 dan Pengantar Ilmu Ekonomi pada Semester Ganjil 2024/2025. Selama masa perkuliahan, penulis mengikuti kegiatan organisasi sebagai anggota bidang I yaitu Akademik dan Pengembangan Profesi di Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian (Himaseperta) periode 2024.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahiim,

Allahuma shalli 'ala Muhammad wa'ala aali Muhammad

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Efektivitas Pemanfaatan Pembiayaan pada Sektor Pertanian dan Pendapatan Usahatani Padi di KSPPS BMT Assyafiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah”** ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak akan terealisasi dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P., selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
2. Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Agribisnis, atas arahan, bantuan, dan nasihat yang telah diberikan.
3. Dr. Ir. Dyah Aring Hepiana Lestari, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Pertama atas ketulusan hati, kesabaran, ilmu, bimbingan, arahan, dukungan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi
4. Ibu Dian Rahmalia, S.P., M.S., sebagai Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan ilmu, arahan, motivasi, dukungan, saran dan meluangkan waktu, serta kesabarannya untuk memberikan bimbingan sepenuh hati kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

5. Dr. Ani Suryani, S.P., M.Sc., sebagai Dosen Pembahas atau Penguji untuk ketulusannya dalam memberikan masukan, arahan, motivasi, saran, dan ilmu yang bermanfaat dalam penyempurnaan skripsi.
6. Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu yang bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
7. Seluruh dosen Jurusan Agribisnis Universitas Lampung untuk semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
8. Seluruh staff di Jurusan Agribisnis atas semua bantuan yang telah diberikan.
9. Pengurus dan Karyawan KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah yang telah mengizinkan dan memberi penulis kesempatan melakukan penelitian di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah.
10. Orang tuaku (Bapak Haryanto dan Ibu Sri Utami), kakakku (Septina), adikku (Rahmad). Terima kasih untuk segala cinta dan doa yang selalu mengiringi sepanjang perjalanan penulis.
11. Sahabat seperjuangan, Nadya, Cahaya, Safira, Khansa, Daena terima kasih atas masukan, saran, semangat, kerjasama, kebersamaan, keceriaan, kesabaran, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Teman-teman terkasih, Atasya, Bila, Shafa, Fathan, Tanti, Zahra, Wanda atas bantuan, dukungan, dan hiburan yang telah diberikan kepada penulis.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan Agribisnis A 2021 dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu untuk bantuan, kebersamaan, keceriaan, keseruan, dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandar Lampung, 10 Juni 2025
Penulis,

Eliza Nur Aini

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS	13
A. Tinjauan Pustaka	13
1. Sistem Agribisnis	13
2. Usahatani Padi.....	17
3. Pendapatan Usahatani Padi	20
4. Lembaga Keuangan.....	22
5. Koperasi	23
6. Koperasi Simpan Pinjam.....	26
7. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (KSPPS BMT).....	28
8. Pembiayaan	30
9. Efektivitas Pembiayaan	34
10. Penelitian Terdahulu	36
B. Kerangka Pemikiran.....	47
C. Hipotesis	50
III. METODE PENELITIAN	51
A. Metode Penelitian	51
B. Definisi Operasional	51
C. Lokasi, Responden, dan Waktu Penelitian	58
D. Jenis dan Metode Pengumpulan Data	60
E. Metode Analisis Data.....	61
1. Analisis Efektivitas Pemanfaatan Pembiayaan Sektor Pertanian..	61
2. Analisis Pendapatan Usahatani Padi	61

3. Analisis Pengaruh Efektivitas Pemanfaatan Pembiayaan dan Jenis Pembiayaan terhadap Pendapatan Usahatani Padi	63
4. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil	67
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	68
A. Keadaan Umum Kabupaten Lampung Tengah	68
B. Keadaan Umum Kecamatan Kota Gajah	71
C. Keadaan Umum KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional	73
D. Keadaan Umum KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah	80
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	82
A. Karakteristik Responden	82
B. Prosedur Pembiayaan	92
C. Efektivitas Pemanfaatan Pembiayaan	94
D. Pola Tanam Padi	99
E. Penggunaan Sarana Produksi Pertanian	99
F. Produksi, Produktivitas dan Penerimaan Usahatani Padi	110
G. Analisis Pendapatan Usahatani Padi	115
H. Analisis Pengaruh Efektivitas Pemanfaatan Pembiayaan Agribisnis dan Jenis Pembiayaan terhadap Pendapatan Usahatani Padi	122
I. Analisis Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil	122
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN	140

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Luas panen, produksi, dan produktivitas padi di Provinsi Lampung.....	3
2. Perkembangan jumlah koperasi per kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2019-2023	5
3. Perkembangan jumlah anggota koperasi menurut kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2019-2023	6
4. Skema pembiayaan.....	31
5. Kajian penelitian terdahulu	38
6. Matriks metode yang diadopsi dari penelitian terdahulu	46
7. Pengkategorian skor efektivitas pemanfaatan pembiayaan.....	61
8. Sebaran tingkat pendidikan petani padi di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah	84
9. Sebaran jumlah tanggungan keluarga petani di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah	84
10. Sebaran pengalaman usahatani yang dilakukan oleh petani padi di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah.....	87
11. Sebaran luas lahan petani padi di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah	88
12. Rata-rata realisasi penggunaan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> per satu hektar luas tanam dari KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah	93
13. Rata-rata penggunaan benih padi pada MT 1 petani padi di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah.....	100

14.	Rata-rata penggunaan pupuk untuk budidaya padi MT 1 oleh petani padi di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah.....	102
15.	Rata-rata penggunaan pestisida untuk budidaya padi MT 1 oleh petani padi di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah.....	103
16.	Rata-rata penggunaan tenaga kerja usahatani padi pada MT 1 pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah	105
17.	Rata-rata biaya penyusutan peralatan yang dimiliki petani padi pada MT 1 di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah.....	107
18.	Rata-rata produksi, produktivitas dan penerimaan usahatani padi per hektar pada MT 1 pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah.....	109
19.	Analisis pendapatan usahatani padi pada MT 1 pembiayaan <i>mudharabah</i> di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah.....	113
20.	Analisis pendapatan usahatani padi pada MT 1 pembiayaan <i>musyarakah</i> di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah.....	114
21.	Hasil uji multikolinearitas pengaruh efektivitas pemanfaatan pembiayaan sektor pertanian terhadap pendapatan usahatani padi	116
22.	Hasil uji heteroskedastisitas pengaruh efektivitas pemanfaatan pembiayaan sektor pertanian terhadap pendapatan usahatani padi	117
23.	Hasil regresi pengaruh efektivitas pemanfaatan pembiayaan sektor pertanian terhadap pendapatan usahatani padi di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah	118
24.	Persentase bagi hasil pada pembiayaan <i>mudharabah</i> di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah.....	122
25.	Persentase bagi hasil pada pembiayaan <i>musyarakah</i> di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah	123
26.	Jumlah pembiayaan oleh anggota petani padi di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.....	124

27.	Perbandingan pendapatan usahatani padi yang dianalisis dan pendapatan usahatani padi yang dilaporkan ke KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Kecamatan Kota Gajah pada pembiayaan <i>mudharabah</i>	126
28.	Perbandingan pendapatan usahatani padi yang dianalisis dan pendapatan usahatani padi yang dilaporkan ke KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Kecamatan Kota Gajah pada pembiayaan <i>musyarakah</i>	126
29.	Identitas responden pembiayaan <i>mudharabah</i>	141
30.	Efektivitas pemanfaatan pembiayaan <i>mudharabah</i>	143
31.	Biaya penyusutan alat pembiayaan <i>mudharabah</i>	157
32.	Biaya tenaga kerja pembiayaan <i>mudharabah</i>	163
33.	Biaya penyediaan sarana produksi (biaya tunai) pembiayaan <i>mudharabah</i>	191
34.	Biaya penyediaan sarana produksi (biaya diperhitungkan) pembiayaan <i>mudharabah</i>	201
35.	Penerimaan usahatani padi MT 1 pembiayaan <i>mudharabah</i>	202
36.	Pendapatan usahatani padi pembiayaan <i>mudharabah</i>	203
37.	Rata-rata penerimaan, biaya, dan pendapatan usahatani padi pada MT 1 pembiayaan <i>mudharabah</i>	205
38.	Identitas responden pembiayaan <i>musyarakah</i>	206
39.	Efektivitas pemanfaatan pembiayaan <i>musyarakah</i>	208
40.	Biaya penyusutan alat pembiayaan <i>musyarakah</i>	222
41.	Biaya tenaga kerja pembiayaan <i>musyarakah</i>	228
42.	Biaya penyediaan sarana produksi (biaya tunai) pembiayaan <i>musyarakah</i>	256
43.	Biaya penyediaan sarana produksi (biaya diperhitungkan) pembiayaan <i>musyarakah</i>	266
44.	Penerimaan usahatani padi MT 1 pembiayaan <i>musyarakah</i>	267
45.	Pendapatan usahatani padi MT 1 pembiayaan <i>musyarakah</i>	268

46.	Rata-rata penerimaan, biaya, dan pendapatan usahatani padi pada MT 1 pembiayaan <i>musyarakah</i>	270
		vii
47.	Data pengaruh efektivitas pemanfaatan pembiayaan dan jenis pembiayaan terhadap pendapatan usahatani padi	271
48.	Hasil uji multikolinearitas	273
49.	Hasil uji heteroskedastisitas	273
50.	Hasil regresi berganda.....	274
51.	Pembiayaan anggota <i>mudharabah</i>	275
52.	Pembiayaan anggota <i>musyarakah</i>	276

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Lingkup pengembangan <i>entrepreneur</i> dalam sistem agribisnis.....	14
2. Kerangka pemikiran analisis pendapatan dan efektivitas pemanfaatan pembiayaan sektor pertanian pada usahatani padi di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah	49
3. Gedung kantor KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.....	74
4. Struktur organisasi KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Kabupaten Lampung Tengah	76
5. Struktur organisasi KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah	80
6. Pekerjaan utama anggota pada pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas	85
7. Pekerjaan sampingan anggota pada pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> di KSPPS BMT Assyafiiyah	86
8. Pola tanam usahatani padi pada pembiayaan <i>mudharabah</i> di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah	95
9. Pola tanam usahatani padi pada pembiayaan <i>musyarakah</i> di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah	95
10. Kepala KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah	278
11. Dokumentasi wawancara responden anggota pembiayaan <i>mudharabah</i> di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah	278

12. Dokumentasi wawancara responden anggota pembiayaan <i>musyarakah</i> di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah	278
---	-----

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (2023), sektor ini menempati urutan ketiga terbesar setelah industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran, dengan persentase 12,53 persen dari total PDB. Peran yang sangat besar ini dipengaruhi oleh berbagai aktivitas dalam bidang pertanian, terutama melalui kegiatan usahatani. Usahatani mencakup berbagai aktivitas yang dijalankan oleh petani pada sebidang lahan. Lahan tersebut ditanami dengan beragam jenis tanaman yang menghasilkan komoditas, di antaranya tanaman pangan dan hortikultura. Hal ini menjadikan aktivitas usahatani tidak hanya menghasilkan produk pangan untuk memenuhi kebutuhan domestik, melainkan juga berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, terutama di kawasan pedesaan, di mana sektor pertanian menjadi sumber utama kehidupan (Mangowal, 2013).

Salah satu peran sektor pertanian memberikan dampak pada peningkatan ketahanan pangan. Ketahanan pangan menjadi penyumbang terbesar dalam sektor pertanian melalui komoditas padi. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan negara Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 2018 dan 2020 dimana tidak terjadi impor beras medium (Saefudin, 2023). Kondisi tersebut terjadi karena adanya penambahan luas tanam yang signifikan. Upaya perluasan lahan tanam terus dilakukan hingga saat ini untuk mendongkrak produksi beras, dan mengurangi ketergantungan impor.

Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung (2023) tentang luas panen dan produksi padi di Indonesia menurut provinsi. Provinsi Lampung merupakan penghasil padi terbesar keenam di Indonesia yaitu sebesar 2.750 ton GKG dan merupakan salah satu sentra produksi padi di luar Pulau Jawa. Angka ini meningkat dari tahun 2022 yang hanya sebesar 2.688 ton GKG. Peningkatan produksi padi di Provinsi Lampung merupakan kabar baik yang mengindikasikan potensi besar daerah ini sebagai salah satu sentra produksi padi di Indonesia. Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Tulang Bawang merupakan tiga kabupaten/kota sentra produksi padi terbesar dibandingkan kabupaten/kota lainnya pada tahun 2023 (BPS Provinsi Lampung, 2023). Peningkatan produksi padi di Provinsi Lampung merupakan kabar baik yang mengindikasikan potensi besar daerah ini sebagai salah satu sentra produksi padi di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah, petani, dan berbagai pihak terkait dalam mengoptimalkan potensi lahan, teknologi pertanian, serta dukungan infrastruktur yang memadai.

Beberapa kabupaten di Provinsi Lampung telah berperan penting dalam meningkatkan produksi padi. Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan secara konsisten menjadi daerah dengan produksi padi terbesar (BPS Provinsi Lampung, 2024). Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas hasil panen, serta memperluas lahan pertanian. Berdasarkan Tabel 1, luas lahan, produksi, dan produktivitas padi di Provinsi Lampung terus meningkat dari tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu sebesar 1,85 persen. Wilayah di Provinsi Lampung yang memiliki tingkat produksi padi paling tinggi adalah Kabupaten Lampung Tengah sebesar 590.404,99 ton pada tahun 2023, dengan persentase kenaikan sebesar 4 persen dari tahun 2022 ke tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Tengah adalah salah satu sentra tanaman padi di Provinsi Lampung. Perkembangan mengenai luas panen, produksi, dan produktivitas padi di Provinsi Lampung pada tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas panen, produksi, dan produktivitas padi di Provinsi Lampung pada tahun 2022 dan 2023

Wilayah	Padi (luas panen, produksi, dan produktivitas)					
	Luas Panen (Ha)		Produksi (Ton)		Produktivitas (Ton/Ha)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Lampung Barat	13.032,88	13.513,57	62.802,09	67.470,20	48,19	49,93
Tanggamus	22.563,40	22.566,27	128.674,92	139.302,86	57,03	61,73
Lampung Selatan	56.393,41	52.334,35	339.941,87	313.847,55	60,28	59,97
Lampung Timur	91.718,06	94.070,36	449.294,90	464.455,76	48,99	49,37
Lampung Tengah	101.612,69	108.129,91	566.601,47	590.404,99	55,76	54,60
Lampung Utara	13.705,47	17.834,92	63.452,76	68.590,79	46,30	38,46
Way Kanan	21.224,06	18.720,83	100.985,27	91.584,18	47,58	48,92
Tulang Bawang	65.510,84	72.025,12	268.323,74	297.566,61	40,96	41,31
Pesawaran	23.359,64	23.009,98	130.558,89	125.462,09	55,89	54,53
Pringsewu	23.489,05	21.752,76	137.096,53	132.233,97	58,37	60,79
Mesuji	57.654,90	56.726,11	296.934,72	296.700,25	51,50	52,30
Tulang Bawang Barat	10.254,68	9.942,54	50.700,33	47.972,16	49,44	48,25
Pesisir Barat	11.921,43	10.860,16	60.772,93	60.398,37	50,98	55,61
Bandar Lampung	491,63	477,44	2.721,97	2.562,22	55,37	53,67
Metro	5.323,92	5.279,15	29.297,35	29.697,11	55,03	56,25
Lampung	518.256,06	527.243,47	2.688.159,74	2.728.249,11	51,87	51,75

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Produktivitas padi di Kabupaten Lampung Tengah mengalami penurunan dari 55,76 ton per hektar pada tahun 2022 menjadi 54,60 ton per hektar pada tahun 2023. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keterbatasan pembiayaan yang dialami petani. Petani skala kecil kesulitan memperoleh sarana dan prasarana pertanian yang memadai, seperti pupuk, benih unggul, pestisida, dan sistem irigasi yang diperlukan (Saefudin, 2023). Permasalahan ini tentunya harus diatasi, diantaranya dengan memberikan akses pembiayaan pertanian yang memadai (Alamsyah, 2015).

Pembiayaan yang tepat menjadikan petani mampu untuk membeli input yang berkualitas dan menerapkan teknologi modern yang lebih efisien, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Tanpa dukungan pembiayaan yang memadai, petani kesulitan mengakses sarana produksi dan inovasi pertanian, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya hasil

panen. Oleh karena itu, pembiayaan menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, serta membantu petani dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada di bidang pertanian (Triyuda, Afifah, dan Azqmi, 2024).

Koperasi berperan penting dalam menyediakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh sektor pertanian, sehingga dapat mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan petani. Koperasi tidak hanya menjadi wadah bagi para petani untuk saling bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan, melainkan juga menyediakan akses pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh para petani. Koperasi dikenal sebagai organisasi ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial milik anggotanya dan berperan dalam membantu pemerataan pendapatan. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992, koperasi merupakan badan usaha yang harus mengikuti aturan-aturan perusahaan dan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku. Kebutuhan modal dalam sektor usaha kecil terutama di bidang pertanian menuntut koperasi untuk mampu menghasilkan keuntungan dalam pengembangan organisasi dan bisnisnya. Oleh karena itu, koperasi diharapkan dapat memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia dan menjadi pilar utama ekonomi nasional (Yasmin, Lestari, dan Affandi, 2019).

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang berbasis kekeluargaan dan memiliki peran penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian. Koperasi berperan sebagai pengelola sumber daya finansial yang efektif untuk melayani kebutuhan petani. Koperasi dapat memberikan kredit kepada petani yang bermodal kecil, sehingga dapat membantu pengembangan usaha pertanian (Cahyani, Prayoga, dan Prasetyo, 2022). Pembiayaan pertanian melalui koperasi memiliki beberapa keuntungan. Pertama, koperasi dapat menawarkan bantuan kredit yang lebih fleksibel dan berjangka panjang yang membantu petani dalam memenuhi kebutuhan modal usaha pertanian. Kedua, koperasi memiliki hubungan yang

erat dengan masyarakat setempat untuk lebih memahami kebutuhan dan potensi petani, sehingga bantuan yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran.

Koperasi berperan penting dalam mendukung petani untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian serta memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah. Peningkatan akses pembiayaan dari koperasi menyebabkan banyak petani yang mampu mengembangkan usahanya dan mencapai kemandirian ekonomi sesuai dengan prinsip koperasi Indonesia (Sumantri dan Permana, 2017). Perkembangan jumlah koperasi di setiap kabupaten di Provinsi Lampung dari tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan jumlah koperasi per kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2019-2023

Kabupaten	Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten (Unit)					Rata-rata Pertumbuhan
	2019	2020	2021	2022	2023	(%)
Lampung Barat	152	157	159	161	162	1,61
Tanggamus	324	333	348	361	363	2,89
Lampung Selatan	463	470	488	501	516	2,75
Lampung Timur	521	530	549	556	563	1,96
Lampung Tengah	654	662	676	688	691	1,39
Lampung Utara	338	340	347	349	352	1,02
Way Kanan	718	752	762	769	769	1,75
Tulang Bawang	192	198	202	204	204	1,53
Pesawaran	216	130	226	139	236	16,33
Pringsewu	179	218	201	231	210	4,96
Mesuji	154	155	157	161	162	1,28
Tulang Bawang Barat	132	189	133	208	139	9,19
Pesisir Barat	66	71	78	80	89	7,81
Bandar Lampung	743	749	762	772	789	1,51
Metro	214	235	254	265	263	5,37
Lampung	5.066	5.189	5.342	5.445	5.508	2,12

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2024

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa jumlah koperasi di kota dan kabupaten di Provinsi Lampung cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir yaitu sebesar 2,12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya berkoperasi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan bersama (Indika dan Marliza, 2019). Kabupaten Lampung

Tengah menempati urutan ketiga dengan jumlah koperasi terbanyak di Provinsi Lampung. Jumlah koperasi di wilayah tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023 dengan jumlah rata-rata pertumbuhan sebesar 1,39 persen. Perubahan jumlah koperasi aktif membuat jumlah anggota koperasi yang ada di Provinsi Lampung juga mengalami perubahan setiap tahunnya. Perkembangan jumlah anggota koperasi di Provinsi Lampung dari tahun 2019 hingga 2023 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan jumlah anggota koperasi menurut kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2019-2023

Kabupaten	Jumlah Anggota Koperasi (Jiwa)					Rata-rata Pertumbuhan
	2019	2020	2021	2022	2023	(%)
Lampung Barat	4.942	5.335	5.418	5.474	3.696	-5,48
Tanggamus	10.566	10.363	11.446	11.528	11.565	2,39
Lampung Selatan	11.273	12.170	10.043	10.369	9.678	-3,23
Lampung Timur	40.015	32.709	20.207	20.296	16.935	-18,15
Lampung Tengah	53.245	58.849	48.375	48.642	44.238	-3,94
Lampung Utara	6.460	7.124	7.307	8.448	8.485	7,23
Way Kanan	11.810	14.487	15.288	16.306	15.723	7,82
Tulang Bawang	26.286	28.323	27.048	27.162	26.771	0,56
Pesawaran	12.628	4.799	11.234	7.115	7.674	10,82
Pringsewu	6.619	12.997	10.981	12.101	11.432	21,38
Mesuji	9.249	9.568	4.116	7.819	6.823	5,92
Tulang Bawang Barat	2.012	9.595	4.758	8.809	6.781	97,15
Pesisir Barat	1.910	1.910	2.285	2.908	863	-5,86
Bandar Lampung	26.342	35.897	47.176	32.216	32.209	8,99
Lampung Metro	13.202	6.395	5.354	6.287	6.923	-10,07
Lampung	236.559	250.521	231.036	225.480	209.796	-2,81

Sumber: BPS Lampung, 2024

Berdasarkan Tabel 3, jumlah anggota koperasi di Provinsi Lampung mengalami perubahan setiap tahun. Jumlah anggota koperasi di Kabupaten Lampung Tengah cenderung menurun sebesar 3,94 persen selama periode 2019-2023. Penurunan ini berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah

koperasi yang naik sebesar 1,39 persen pada periode yang sama. Perbedaan ini disebabkan oleh perubahan regulasi, dari Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 yang menetapkan minimal 20 anggota per koperasi diturunkan menjadi menjadi 9 anggota berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 07 Tahun 2021. Perubahan aturan tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah anggota koperasi, meskipun jumlah koperasi itu sendiri terus bertambah.

Koperasi di Provinsi Lampung berjumlah 5.508 unit pada tahun 2023 dan Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten dengan jumlah koperasi terbanyak ke tiga di Provinsi Lampung sebanyak 691 unit (BPS Provinsi Lampung, 2023). Berdasarkan jumlah keanggotaan koperasi, Kabupaten Lampung Tengah menduduki urutan pertama di Provinsi Lampung dengan total anggota koperasi berjumlah 44.283 jiwa (BPS Provinsi Lampung, 2023). Berdasarkan data BPS Kabupaten Lampung Tengah (2023), dari seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, 47 diantaranya adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) baik itu dengan pola syariah maupun dengan pola konvensional. Koperasi simpan pinjam dengan pola konvensional di Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 22 unit. Koperasi simpan pinjam dengan pola syariah di Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 25 unit. Koperasi syariah mengalami perkembangan cukup pesat pada tahun terakhir karena memiliki banyak kelebihan.

Kelebihan koperasi syariah adalah menggunakan sistem bagi hasil, berbeda dengan koperasi konvensional yang menerapkan sistem bunga. Jika anggota mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian, maka risiko tersebut ditanggung bersama antara koperasi dan anggota. Apabila terjadi gagal bayar yang bukan karena kelalaian, selain melalui program restrukturisasi, koperasi syariah juga memiliki lembaga *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Melalui dana sosial yang dikelola Baitul Maal, koperasi lebih fokus pada penghimpunan dan penyaluran dana yang bersifat non profit bagi anggota atau masyarakat yang membutuhkan (Naheri, Adawiyah, Masse, 2024).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* (KSPPS BMT) Assyafiiyah Berkah Nasional (Ber-Nas) merupakan pelopor koperasi berbasis syariah di Kabupaten Lampung Tengah, bahkan menjadi yang pertama di Provinsi Lampung. KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas memiliki kantor cabang sebanyak 46 yang tersebar di Provinsi Lampung dan tiga diantaranya tersebar di luar Provinsi Lampung. KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas yang terletak di Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah merupakan koperasi yang masuk ke dalam peringkat 100 koperasi besar di Indonesia pada tahun 2023 (KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas, 2024). KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas merupakan salah satu KSPPS primer yang berstandar nasional dengan keunggulan sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki fungsi sebagai *baitul tamwil* dan *baitul maal*. *Baitul tamwil* bergerak mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas usaha mikro dan kecil anggota dengan mendorong kegiatan menyimpan dan menabung serta pembiayaan ekonomi. Salah satu misi KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas yaitu meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syariah.

B. Rumusan Masalah

Efektivitas pemanfaatan pembiayaan menjadi penentu keberhasilan koperasi dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga ekonomi yang berpegang pada prinsip-prinsip gotong royong dan kebersamaan. Efektivitas pemanfaatan pembiayaan koperasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan koperasi dalam menyalurkan dana kepada anggotanya, melainkan didukung dengan kemampuan anggota dalam memanfaatkan pembiayaan tersebut untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan (Yoko, 2016). Pembiayaan dikatakan efektif apabila mampu mendorong pertumbuhan usaha dan meningkatkan pendapatan anggota. Anggota koperasi pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Assyafiiyah

Ber-Nas terdiri dari pedagang, petani, dan penyedia jasa. Pemanfaatan pembiayaan oleh petani, khususnya petani padi menjadi aspek penting dalam meningkatkan penggunaan input produksi menjadi efisien, sehingga produksi dan produktivitas usahatani meningkat dan pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan usahatani padi. Pembiayaan juga memungkinkan petani untuk menerapkan teknologi modern dan praktik pertanian yang lebih efisien, sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan lahan dan sumber daya (Yoko, 2016). Efektivitas pemanfaatan pembiayaan pertanian untuk meningkatkan alokasi penggunaan input dipengaruhi oleh sejauh mana pembiayaan tersebut digunakan untuk usahatani. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana petani memanfaatkan pembiayaan, apakah sepenuhnya digunakan untuk perbaikan input usahatani, atau sebagian dialihkan untuk kebutuhan lain seperti konsumsi atau keperluan sosial masyarakat.

Pada tahun 2020, KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas menghentikan seluruh produk pembiayaan. Keputusan ini diambil berdasarkan instruksi dari Kementerian Koperasi dan dinas terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten. Koperasi diminta untuk bersikap sangat hati-hati dalam melakukan pembiayaan, mengingat tingginya risiko akibat situasi ekonomi yang tidak menentu selama pandemi COVID-19. Keputusan jajaran pengurus untuk menghentikan pembiayaan pada masa tersebut berdampak pada kinerja koperasi, terutama dalam hal pendapatan dan kepercayaan anggota.

Pada tahun 2021, dilakukan pemulihan secara bertahap dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang dianjurkan oleh Kementerian Koperasi dan dinas terkait, sehingga pembiayaan telah kembali normal hingga saat ini. Koperasi terus berupaya mendukung kebutuhan setiap anggotanya, khususnya melalui pembiayaan sektor pertanian yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* ditujukan untuk petani yang tidak memiliki modal sama sekali sehingga koperasi menyediakan seluruh modal usaha dengan mekanisme bagi hasil.

Jika usaha mengalami kerugian dan kesulitan dalam membayar bagi hasil sering menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian pembiayaan. Pembiayaan *musyarakah* diberikan kepada petani yang kekurangan modal, yaitu petani tersebut turut berkontribusi dengan modal sendiri, meskipun tetap berisiko menghadapi masalah pembayaran jika usaha mengalami kerugian.

Secara umum, BMT Assyafiiyah Ber-Nas menetapkan persentase bagi hasil sebesar 40:60. Persentase tersebut bersifat fluktuatif, dengan variasi antara 20:80, 30:70, dan 50:50, bergantung pada kesepakatan nisbah yang dicapai. Perbedaan persentase ini disebabkan oleh karakteristik pembiayaan *mudharabah*, yaitu beberapa anggota menganggap peran BMT hanya sebagai pemilik modal, sedangkan kontribusi lahan, tenaga kerja, dan faktor lainnya berasal dari anggota. Hal ini mendorong beberapa anggota untuk meminta porsi bagi hasil yang lebih besar. Ada beberapa anggota lain juga berpendapat bahwa ketika menerima bagian nisbah yang lebih besar, maka harus menanggung risiko kerugian dalam porsi yang sebanding. Oleh karena itu, meskipun persentase secara umum adalah 60:40 (60 persen untuk lembaga dan 40 persen untuk anggota) variasi tetap ada, sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Pada pembiayaan *musyarakah* pembagian keuntungan/kerugian sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak. Jika pihak koperasi memberikan modal lebih besar dibandingkan dengan anggota, maka koperasi akan menerima porsi bagi hasil yang lebih besar, dan sebaliknya.

Beberapa anggota yang tidak dapat menutupi kerugian sering melewati jatuh tempo, bahkan ada yang mengalami kemacetan total dalam melunasi pembiayaan. Kondisi ini berdampak pada stabilitas sistem bagi hasil koperasi, serta mengganggu pendapatan koperasi dan kesejahteraan anggotanya. Permasalahan ini menjadikan KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas saat ini berupaya untuk memperkuat kemitraan dengan memberikan dukungan dalam promosi dan administrasi yang tidak hanya memperluas cakupan pasar tetapi juga memperbaiki proses bagi hasil antara petani dan koperasi. Pemantauan

dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan pembiayaan digunakan secara efektif dan efisien, sehingga koperasi berperan aktif tidak hanya sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai mitra yang mendukung keberhasilan usahatani anggotanya.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas di Cabang Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pemanfaatan pembiayaan sektor pertanian oleh KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas kepada petani padi di Cabang Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana pendapatan usahatani padi dengan pemanfaatan pembiayaan sektor pertanian dari KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas di Cabang Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah?
3. Bagaimana pengaruh efektivitas pemanfaatan pembiayaan sektor pertanian dan jenis pembiayaan terhadap pendapatan usahatani padi di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah?
4. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pada pembiayaan sektor pertanian antara petani padi dan KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas di Cabang Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis efektivitas pemanfaatan pembiayaan sektor pertanian oleh KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas kepada petani padi di Cabang Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Menganalisis pendapatan usahatani padi dengan pemanfaatan pembiayaan sektor pertanian dari KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas di Cabang Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.

3. Menganalisis pengaruh efektivitas pemanfaatan pembiayaan sektor pertanian dan jenis pembiayaan terhadap pendapatan usahatani padi di Cabang Kota Gajah KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Kabupaten Lampung Tengah.
4. Menganalisis pelaksanaan sistem bagi hasil pada pembiayaan sektor pertanian antara petani padi dan KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas di Cabang Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Koperasi
Penelitian ini dapat membantu koperasi memahami sejauh mana pembiayaan yang tersedia dimanfaatkan oleh anggota petani padi.
2. Pengambil Kebijakan/Pemerintah
Sebagai tambahan informasi mengenai hubungan antara efektivitas pemanfaatan pembiayaan sektor pertanian dan pendapatan usahatani padi.
3. Peneliti lain
Sebagai referensi dalam melakukan penelitian sejenis atau menyempurnakan sebelumnya.

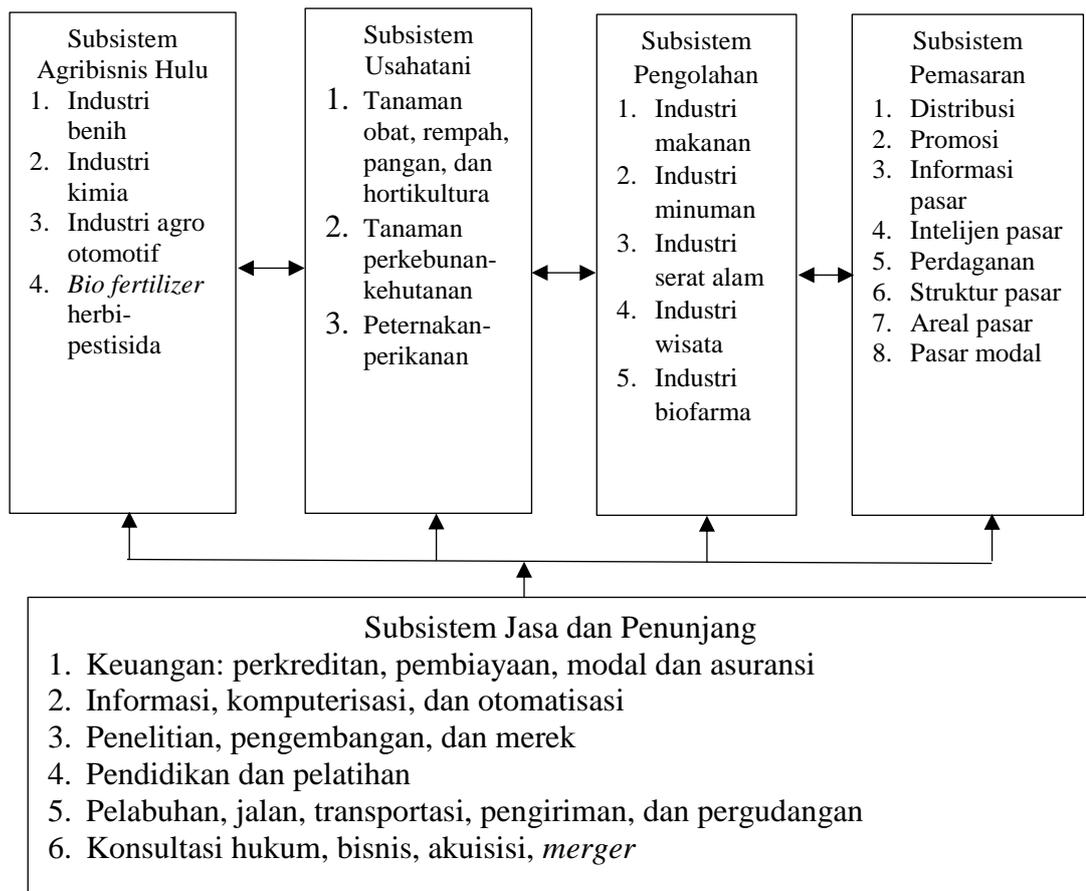
II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Sistem Agribisnis

Agribisnis berasal dari kata *agribusiness*, *agri* berarti *agriculture* artinya pertanian dan *business* berarti usaha atau kegiatan yang berorientasi profit. Secara sederhana, agribisnis adalah kegiatan usaha yang menggabungkan sektor pertanian dengan prinsip-prinsip bisnis modern dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan (Maulidah, 2012). Menurut Primyastanto (2011) agribisnis merupakan suatu kesatuan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil, pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas, yaitu adanya kegiatan usaha untuk menunjang kegiatan pertanian. Agribisnis memiliki beberapa subsistem di dalamnya dan tergabung dalam sistem yang terorganisir.

Kegiatan agribisnis bukan hanya berorientasi pada sistem yang tradisional, melainkan terdapat juga kegiatan *off-farm* seperti agroindustri dan pemasaran. Agribisnis memiliki beberapa subsistem yang saling terhubung dan beroperasi dalam suatu sistem yang terorganisir, setiap subsistem berfungsi untuk menunjang keberhasilan dan keberlangsungan dari seluruh kegiatan agribisnis. Subsistem-subsistem ini mencakup penyediaan sarana produksi, usahatani, pengolahan hasil, pemasaran, serta jasa layanan penunjang yang semuanya berkontribusi dalam meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Hubungan setiap subsistem agribisnis dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Lingkup pengembangan *entrepreneur* dalam sistem agribisnis
Sumber: Pambudy (2023)

Agribisnis mencakup setiap usaha yang berkaitan dengan kegiatan produksi pertanian yaitu meliputi pengelolaan input pertanian atau pengelolaan produksi itu sendiri ataupun pengolahan hasil pertanian. Agribisnis mempelajari strategi untuk memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, sarana penyediaan bahan baku, proses pasca panen, proses pengolahan hasil sampai ke tahap pemasaran (Maulidah, 2012). Sistem agribisnis memiliki beberapa subsistem, diantaranya subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi, subsistem produksi usahatani, subsistem pengolahan hasil, subsistem pemasaran, dan subsistem jasa layanan penunjang. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing subsistem agribisnis:

a. Subsistem Pengadaan dan Penyaluran Sarana Produksi

Subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi sering disebut dengan subsistem penyediaan sarana produksi atau sektor hulu.

Subsistem agribisnis hulu mencakup kegiatan dalam memproduksi dan menyalurkan *input* pertanian dalam arti luas. Subsistem ini mencakup kegiatan perencanaan dan pengelolaan dari sarana produksi atau *input* usahatani. Subsistem ini diperlukan karena adanya keterpaduan dari berbagai unsur tersebut untuk mewujudkan kelancaran kegiatan agribisnis (Maulidah, 2012).

b. Subsistem Usahatani

Menurut Abubakar, Baruwadi, dan Halid (2022) usahatani diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Pernyataan efektif ditunjukkan apabila petani dapat mengalokasikan sumberdaya yang mereka miliki sebaik-baiknya dan dikatakan efisien apabila pemanfaatan sumberdaya tersebut menghasilkan keluaran (*output*). Tersediannya sarana atau faktor produksi (*input*) belum berarti produktivitas yang diperoleh petani akan tinggi.

Subsistem usahatani mencakup kegiatan pada pertanian primer atau pertanian awal seperti budidaya tanaman, ternak dan lainnya. Pelaku subsistem usahatani adalah pelaku dengan skala kecil seperti petani, peternak, dan sebagainya (Rachmina, 2015). Kegiatan usahatani perlu ditingkatkan agar menghasilkan produksi yang tinggi dan berpengaruh pada pendapatan yang diterima petani. Subsistem usahatani merupakan kegiatan di tingkat petani, pekebun, peternak, dan nelayan serta dalam arti khusus termasuk kegiatan kehutanan yang berupaya mengelola *input-input* (lahan, tenaga kerja, modal, teknologi, dan manajemen) untuk menghasilkan produk pertanian (Saragih, 2010).

c. Subsistem Pengolahan

Subsistem agribisnis hilir merupakan kegiatan agroindustri yang menggunakan produk pertanian sebagai bahan baku utama. Subsistem ini sangat penting apabila ditempatkan di pedesaan karena dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Maulidah, 2012). Pengolahan hasil yaitu mengolah produk pertanian menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi. Pengolahan ini dapat berupa pengupasan kulit luar dada, dan pengeringan. Nilai tambah adalah adanya pertambahan nilai karena adanya proses pengubahan komoditas menjadi bentuk lain.

d. Subsistem Pemasaran

Subsistem pemasaran sangat berpengaruh terhadap ekonomi petani. Pada umumnya, di antara para pelaku pemasaran, posisi petani adalah yang paling lemah karena keterbatasan modal dan informasi yang diterima. Akibatnya, petani sering mendapatkan harga yang rendah dan harus menghadapi ketidakpastian harga jual. Lembaga pemasaran yang banyak berpengaruh terhadap margin pemasaran yang mana semakin tinggi margin pemasaran, maka persentase harga yang diterima petani menjadi semakin kecil (Virgiana, Arifin, dan Suryani, 2019).

e. Subsistem Jasa Layanan Penunjang

Menurut Maulidah (2012), subsistem jasa penunjang agribisnis adalah semua kegiatan yang berfungsi untuk mendukung dan melayani dalam mengembangkan kegiatan subsistem hulu, subsistem usahatani, dan subsistem hilir. Subsistem jasa layanan penunjang mempunyai banyak lembaga dalam kegiatan agribisnis seperti lembaga keuangan (perbankan, model ventura, dan asuransi yang memberikan layanan keuangan berupa pinjaman dan penanggungungan risiko usaha khusus asuransi), lembaga penyuluhan dan konsultan yang memberikan layanan informasi yang dibutuhkan oleh petani dan pembinaan teknik produksi, budidaya pertanian, dan manajemen pertanian, serta lembaga penelitian baik yang dilakukan oleh balai penelitian atau perguruan tinggi yang memberikan

layanan informasi teknologi produksi, budidaya, atau teknik manajemen mutakhir hasil penelitian dan pengembangan.

Jasa layanan penunjang dalam sistem agribisnis secara langsung atau tidak langsung memberikan dampak yang baik bagi usaha tani. Jasa layanan penunjang bukan hanya dari pemerintah seperti koperasi, penyuluh atau kelompok tani. Namun, jasa layanan penunjang lain seperti pedagang yang bermitra dengan petani akan memberikan keuntungan, karena akan mendapatkan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak bermitra (Mahjali, 2012). Keberhasilan suatu sistem agribisnis juga dipengaruhi oleh lembaga agribisnis yang terlibat seperti tingkat kepuasan tertinggi yang ada pada pedagang kabupaten dan pengecer, dan tingkat ketergantungan tertinggi dialami oleh petani (Kasimin, 2013).

2. Usahatani Padi

Usahatani adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana seseorang mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu (Triatmoko dan Fitriadi, 2020). Efektif dapat dikatakan apabila petani mengalokasikan sumber daya yang dia miliki sebaik-baiknya, dan dapat dikatakan efisien bila pemanfaatan sumberdaya tersebut mengeluarkan *output* yang melebihi *input*. Usahatani tidak hanya berfokus pada hasil akhir atau *output*, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan *input* dalam proses produksi. Sarana produksi, seperti benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja, perlu digunakan secara efektif dan efisien dalam proses produksi untuk menghasilkan output yang optimal.

Pelaksanaan kegiatan usahatani dilakukan dengan melalui berbagai tahapan sampai akhirnya dapat menghasilkan *output*. Berikut ini adalah tahapan budidaya tanaman padi (Triatmoko dan Fitriadi, 2020):

a. Pembersihan dan Pengolahan Tanah

Pembersihan lahan adalah proses yang dilakukan untuk menghilangkan sisa-sisa tanaman sebelumnya dari area tertentu. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghindari adanya gangguan terhadap pertumbuhan tanaman padi yang dapat disebabkan oleh berbagai jenis tumbuhan lain yang tidak diinginkan. Proses pengolahan tanah yang dilakukan berfungsi sebagai persiapan lahan, termasuk dalam tahap pembersihan atau penyiangan, yang melibatkan penggunaan traktor.

b. Persemaian

Persemaian dilakukan dengan menanam benih pada kedalaman 3 cm. Setelah sekitar 23 hingga 25 hari, bibit tersebut dicabut dan dipindahkan ke lahan pertanaman. Proses pemindahan ini dilakukan dengan menetapkan jarak tanam sebesar 30×45 cm, dengan minimal penanaman sebanyak 5 batang per lubang. Selanjutnya, setelah tanaman berusia 30 hari, bibit akan dipecah lagi menjadi lacak dengan jarak tanam yang lebih luas, yaitu 45×75 cm, tetap dengan jumlah minimal 5 batang per lubang. Setelah periode lacakan berlangsung selama 30 hari, bibit tersebut baru akan dipindahkan ke lokasi pertanaman yang permanen. Tujuan utamanya adalah untuk memperbesar ukuran, memperkuat pertumbuhan, serta meningkatkan jumlah bibit yang tersedia. Salah satu keuntungan dari metode ini adalah penggunaan benih yang lebih efisien; jumlah benih yang diperlukan hanya sekitar seperenam dari jumlah benih yang dibutuhkan jika ditanam langsung di lahan.

c. Penanaman

Penanaman yang dilakukan oleh petani adalah dengan memindahkan bibit padi yang ada di persemaian ke lahan yang lebih luas. Petani menanam bibit kira-kira dengan jarak tanam kurang lebih $42,5 \text{ cm} \times 42,5 \text{ cm}$, penanaman dilakukan dengan menggunakan tugal dengan ujung runcing sepanjang 2 – 3 cm. Setelah beberapa waktu, dapat

dilakukan penyulaman untuk mengganti apabila ditemukan bibit yang mati.

d. Penyiangan

Kegiatan penyiangan adalah proses pembersihan area pertanaman padi dari berbagai jenis tanaman liar yang dapat menghambat pertumbuhan padi. Proses ini dilakukan dengan cara mencabut gulma yang tumbuh di sekitar lahan tempat padi ditanam. Penyiangan dilakukan ketika jumlah gulma mulai meningkat dan berkembang di sekitar tanaman padi.

e. Pemupukan

Pemupukan ini dilakukan dalam tiga tahap yang penting dan teratur untuk mendukung pertumbuhan optimal tanaman padi. Tahap pertama dilakukan sebelum penanaman sebagai persiapan awal lahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Tahap ke dua dilaksanakan pada usia tanaman sekitar 18 hingga 20 hari yang merupakan fase krusial untuk pertumbuhan vegetatif. Tahap ke tiga dilakukan ketika tanaman mulai memasuki fase bunting atau primordia yaitu saat pembentukan malai. Hal ini penting untuk pembentukan bulir padi. Pemberian pupuk ini dilakukan dengan cara menabur secara merata di sekitar tanaman, sekitar dua bulan setelah penanaman, guna memastikan bahwa nutrisi terserap dengan baik oleh tanaman untuk mendukung hasil panen yang maksimal.

f. Pengendalian Hama dan Penyakit

Kegiatan pengendalian hama dan penyakit sangat diperlukan karena dapat mengganggu kelangsungan pertumbuhan padi. Pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan dengan cara menggunakan musuh alami atau menggunakan pestisida jika sudah tinggi serangan hama dan penyakit. Hama yang menyerang tanaman padi seperti tikus, penggerek batang, dan walang sangit. Pada umumnya petani mengadakan gotong royong untuk membasmi tikus. Selain itu,

penggerek batang dan walang sangit dibasmi dengan menggunakan insektisida.

g. Panen dan Pasca Panen

Panen biasanya dilakukan ketika tanaman padi sudah mencapai tingkat kematangan yang cukup. Padi siap dipanen ketika bulir-bulirnya telah berubah menjadi kuning. Petani menggunakan metode panen tradisional maupun menggunakan mesin. Setelah padi dipanen, hasilnya dikumpulkan dan dirontokkan, lalu dikeringkan di atas terpal. Proses pengeringan ini bertujuan untuk menurunkan kadar air pada gabah dari sekitar 23 – 27 persen menjadi 13 – 14 persen. Pengeringan sangat penting karena berpengaruh pada tingkat keretakan gabah dan dapat mencegahnya mudah pecah.

3. Pendapatan Usahatani Padi

Pendapatan usahatani ada dua unsur yang digunakan yaitu unsur penerimaan dan pengeluaran dari usahatani tersebut. Penerimaan adalah hasil perkalian jumlah produk total dengan satuan harga jual, sedangkan pengeluaran atau biaya yang dimaksudkan sebagai nilai penggunaan sarana produksi dan lain-lain yang dikeluarkan pada proses produksi tersebut (Simanjuntak, 2018). Produksi berkaitan dengan penerimaan dan biaya produksi, penerimaan tersebut diterima petani karena masih harus dikurangi dengan biaya produksi yaitu keseluruhan biaya yang dipakai dalam proses produksi tersebut.

Pendapatan usahatani dikelompokkan menjadi dua yaitu pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Pendapatan kotor adalah seluruh pendapatan yang diperoleh petani dalam usahatani selama satu tahun yang dapat diperhitungkan dari hasil penjualan atau pertukaran hasil produksi yang dinilai dalam rupiah berdasarkan harga per satuan berat pada saat pemungutan hasil. Pendapatan bersih adalah seluruh pendapatan yang

diperoleh petani dalam satu tahun dikurangi dengan biaya produksi selama proses produksi (Sadarudin, Baruwadi, dan Murtisari, 2017).

Biaya total merupakan penjumlahan seluruh biaya yang dikeluarkan baik untuk biaya tetap maupun biaya variabel. Menurut Suratiyah (2015) biaya total ditentukan dengan rumus:

$$TC = TFC + TVC$$

Keterangan:

TC = Biaya total (Rp/MT)

TFC = Total biaya tetap (Rp/MT)

TVC = Total biaya variabel (Rp/MT)

Secara matematis untuk menghitung penerimaan usahatani padi menurut Suratiyah (2015) dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$TR = P_y \cdot Y$$

Keterangan:

P_y = Harga Produksi (Rp/Kg)

Y = Jumlah Produksi (Kg)

Menurut Suratiyah (2015) pendapatan adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya usahatani padi. Pendapatan usahatani padi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\pi = TR - TC$$

Keterangan:

π = Pendapatan (Rp/MT)

TR = Total *revenue*/total penerimaan (Rp/MT)

TC = Total *cost*/total biaya (Rp/MT)

Kegiatan usahatani yang dilakukan oleh petani perlu dilakukan analisis R/C untuk mengetahui apakah usahatani tersebut menguntungkan atau merugikan. Analisis *Return Cost Ratio* (R/C) merupakan perbandingan (*ratio* atau *nisbah*) antara penerimaan (*revenue*) dengan biaya (*cost*).

Menurut Yusriadi dan Irwan (2022) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$R/C = \frac{TR}{TC}$$

Keterangan:

R/C = Nisbah penerimaan dan biaya

TR = Total *revenue* (total penerimaan)

TC = Total *cost* (total biaya)

Terdapat tiga kriteria dalam mengartikan R/C yaitu:

- a. Jika $R/C > 1$, maka usahatani dijalankan mengalami keuntungan.
- b. Jika $R/C < 1$, maka usahatani dijalankan mengalami kerugian
- c. Jika $R/C = 1$, maka usahatani yang dijalankan tidak mengalami keuntungan atau kerugian (impas).

4. Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat (Afrianty, Isnaini, dan Oktarina, 2020).

Fungsi utama lembaga keuangan adalah memfasilitasi aliran dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) ke pihak yang membutuhkan dana (perusahaan). Lembaga keuangan berperan sebagai perantara yang menghubungkan pasar uang dan pemilik modal. Melalui kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, lembaga keuangan mendistribusikan dana tersebut dalam bentuk kredit atau pembiayaan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi (Wiwoho, 2014).

Lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Adapun Lembaga Keuangan non bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana melalui penerbitan surat berharga untuk kemudian diinvestasikan (Fuadi, 2020).

5. Koperasi

Koperasi adalah organisasi nirlaba yang termasuk dalam kategori lembaga non-bank dan menjalankan unit usaha simpan pinjam. Secara etimologi, istilah "koperasi" berakar dari kata "*co-operation*" yang berarti kerja sama. Menurut Peraturan Pemerintah No 07 Tahun 2021 tentang Perkoperasian pasal 1, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi juga berasaskan kekeluargaan yang memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 3 menetapkan tujuan koperasi sebagai lembaga yang berperan penting dalam memajukan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat luas pada umumnya. Koperasi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya melalui peningkatan ekonomi, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional (Rufaidah, 2017). Koperasi membantu

membentuk tatanan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan merata melalui partisipasi aktif dalam perekonomian. Hal ini sejalan dengan visi untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Peraturan Pemerintah No. 07 Tahun 2021 tentang Perkoperasian pasal 12 bahwa koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;
- b. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. Kemandirian;
- f. Pendidikan perkoperasian; dan
- g. Kerja sama antar-Koperasi

Jenis-jenis koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 15 dikenal dua bentuk koperasi sebagai berikut:

a. Koperasi Primer

Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang dan minimal dibentuk sekurang-kurangnya oleh 20 orang. Koperasi primer banyak sekali ditemukan di dalam sebuah perusahaan, lembaga pemerintah, sekolah, tingkat kecamatan dan lain-lain.

b. Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder merupakan bentuk organisasi koperasi yang dibentuk oleh gabungan minimal tiga koperasi. Tujuan pembentukan koperasi sekunder umumnya untuk memperluas jangkauan usaha dan meningkatkan kekuatan ekonomi para anggotanya. Mendirikan koperasi sekunder perlu dilakukan kajian mendalam terkait jenis usaha yang akan dijalankan serta karakteristik anggota yang sesuai.

Peraturan Pemerintah No. 07 Tahun 2021 tentang Perkoperasian

Pasal 3 pengertian jenis-jenis koperasi berubah menjadi:

- a. Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.
- b. Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) koperasi.

Pasal 16 UU No. 25 Tahun 1992 menjelaskan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Jenis-jenis koperasi menurut Pasal 16 UU No. 25 Tahun 1992 sebagai berikut:

- A. Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Anggota koperasi ini memiliki identitas sebagai pemilik dan sebagai pelanggan. Anggota koperasi konsumen bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau dan meningkatkan taraf hidupnya.
- B. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para petani, nelayan, atau pengusaha kecil. Anggota koperasi bekerja sama untuk mengolah hasil produksi menjadi produk akhir yang siap dijual sehingga mendapatkan harga yang lebih baik dan akses pasar yang lebih luas.

- C. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam penghimpunan simpanan dari anggota kemudian meminjamkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan. Koperasi ini anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (*owner*) dan nasabah (*customers*).
- D. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang membantu para anggotanya menjual hasil produksi. Anggota koperasi ini menyerahkan produknya kepada koperasi untuk dijual ke pasar yang lebih luas sehingga mendapatkan harga yang lebih baik dan tidak perlu repot mencari pembeli.
- E. Koperasi jasa adalah koperasi dengan usaha bersama yang menyediakan berbagai jenis jasa, seperti jasa transportasi, jasa kesehatan, atau jasa konsultasi. Anggota koperasi ini bisa menjadi pengguna jasa atau penyedia jasa.

6. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah suatu lembaga keuangan yang tidak berstatus sebagai bank, melainkan berbentuk koperasi. Koperasi simpan pinjam adalah salah satu dari beberapa jenis koperasi yang diatur dalam Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bertujuan untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat yang non anggota (Afifudin, 2018). Kegiatan utama dari koperasi simpan pinjam adalah menerima simpanan serta memberikan pinjaman uang kepada anggotanya dengan tingkat bunga yang relatif rendah. Koperasi simpan pinjam sering disebut sebagai koperasi kredit, merupakan jenis koperasi *independen* dimana anggotanya terdiri dari individu atau badan hukum yang tergabung dalam koperasi tersebut. Masyarakat yang tidak terdaftar sebagai anggota tidak memiliki hak untuk menyimpan atau meminjam uang dari koperasi simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam mendapatkan modalnya dari dua sumber utama: modal pinjaman dan modal sendiri. Modal pinjaman diperoleh dari anggota, koperasi lain, serta lembaga keuangan seperti bank. Modal sendiri berasal dari anggota koperasi dalam bentuk simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela, dan hibah (Ompusunggu, Sutrisno, dan Hukom, 2023). Secara garis besar, sumber modal koperasi meliputi:

- a) Simpanan pokok merupakan simpanan wajib yang harus dibayar oleh anggota saat pertama kali bergabung dengan koperasi dan tidak dapat diambil kembali selama menjadi anggota. Besaran simpanan pokok ini sama untuk setiap anggota.
- b) Simpanan wajib merupakan simpanan yang harus disetorkan oleh anggota koperasi dalam periode waktu tertentu dan dengan nominal yang telah ditentukan.
- c) Simpanan sukarela merupakan simpanan yang diserahkan oleh anggota secara sukarela dan bisa diambil kembali kapan saja.
- d) Hibah/donasi merupakan uang atau barang yang diterima dari pihak pemberi dengan sifat tidak mengikat.

Fungsi dan peran koperasi antara lain sebagai berikut (Muljono, 2012):

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya menaikkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Berbagai manfaat dari koperasi simpan pinjam yang dapat diperoleh para anggota adalah (Muljono, 2012):

- a. Memberi kemudahan anggota untuk memperoleh modal usaha
- b. Memberi keuntungan kepada anggota melalui Sisa Hasil Usaha (SHU)
- c. Mengembangkan usaha anggota koperasi
- d. Meniadakan praktik rentenir

7. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* (KSPPS BMT)

Salah satu bentuk lembaga keuangan syariah di masyarakat adalah KSPPS yang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro. KSPPS adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum koperasi yang menggunakan sistem bagi hasil dan menerapkan aturan menurut Syariat Islam (Arlina, Yazid, dan Hidayat, 2023). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah (KSPPS) sebelumnya disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan sistem intermediasi keuangan di tingkat mikro yang didalamnya terdapat *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* yang dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah (Gustati, 2017).

Fungsi KSPPS adalah untuk membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Selain itu, KSPPS juga berperan dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia anggota, sehingga menjadi lebih amanah, profesional (*fathonah*), konsisten, dan istiqomah dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dan Syariat Islam. KSPPS juga berupaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha-usaha produktif di kalangan anggotanya.

Fungsi BMT sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Syariat Islam. Lembaga ini didirikan untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil, *ijarah*, dan *wadi'ah* (Mardani, 2015).

Menurut Mardani (2015) BMT memiliki beberapa peran sebagai berikut:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah. Melalui pelatihan dan penyuluhan dapat bisa membantu masyarakat memahami pentingnya berbisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti kejujuran dan keadilan.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus berperan aktif dalam membimbing dan memberikan modal kepada usaha kecil, agar usaha-usaha ini bisa berkembang dengan baik.
- c. Melepaskan ketergantungan rentenir. Masyarakat yang masih bergantung pada rentenir atau membutuhkan akses cepat terhadap dana. Oleh karena itu, BMT harus menjadi alternatif yang lebih baik bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan pinjaman dari rentenir.
- d. Menjadi keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT berinteraksi langsung dengan masyarakat yang memiliki beragam kompleksitas, sehingga diperlukan evaluasi untuk menentukan prioritas yang harus diperhatikan. BMT harus memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses yang sama terhadap layanan keuangan, agar tidak ada kesenjangan ekonomi.

8. Pembiayaan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa pembiayaan yang didasarkan pada prinsip syariah merupakan suatu bentuk penyediaan dana atau tagihan yang dianggap setara dengan uang, yang diberikan oleh bank kepada pihak lain. Pembiayaan ini dilakukan berdasarkan adanya persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pihak bank sebagai pemberi pembiayaan dan pihak nasabah sebagai penerima pembiayaan. Pihak yang menerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya, serta memberikan imbalan berupa keuntungan atau bagi hasil sesuai prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Prinsip syariah menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 13 merupakan aturan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dengan pihak lain, baik dalam hal penyimpanan dana maupun pembiayaan kegiatan usaha. Prinsip ini juga mencakup berbagai aktivitas lainnya yang tidak bertentangan dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Beberapa bentuk akad atau transaksi yang termasuk dalam prinsip syariah tersebut antara lain:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil menggunakan perangkat syariah yang disebut *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* yaitu sistem kerja sama antara dua belah pihak yang terdiri dari pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudlorib*) baik bersifat keuangan atau institusi (lembaga) dengan ketentuan bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada waktu transaksi (akad) apabila mendapat hasil atau keuntungan. Apabila mengalami kerugian akibat faktor alam ditanggung bersama. Namun, apabila kelalaian tersebut disebabkan oleh pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.

- b. Pembiayaan *musyarakah* yaitu sistem kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Berdasarkan 3 jenis pembiayaan tersebut dapat dijelaskan dalam bentuk skema yang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Skema pembiayaan

Keterangan	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Murabahah</i>
Modal	100 persen berasal dari koperasi	Modal berasal dari anggota dan koperasi	Berupa barang modal
Bagi hasil/keuntungan	Dibagi sesuai kesepakatan awal dalam akad	Dibagi sesuai dengan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak	Tidak menggunakan sistem bagi hasil, tetapi keuntungan sudah ditentukan diawal (<i>margin</i>)
Resiko kerugian	Ditanggung bersama jika bukan akibat kelalaian pengelola, jika karena kelalaian, pengelola bertanggung jawab penuh	Ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing	Tidak ada konsep bagi rugi, karena berbasis jual beli
Jenis akad	Akad kerja sama antara pemilik modal (<i>shahibul maal</i>) dan pengelola usaha (<i>mudharib</i>)	Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha bersama	Akad jual beli dengan keuntungan disepakati di awal

Sumber: KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, 2024

Berdasarkan Tabel 4 menjelaskan tiga jenis skema pembiayaan syariah yang diterapkan, yaitu *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah*. Pembiayaan *Mudharabah*, seluruh modal berasal dari koperasi dan pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung bersama kecuali jika terjadi kelalaian oleh pengelola. Pembiayaan *Musyarakah*, modal berasal dari koperasi dan anggota, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi modal masing-masing pihak. Pembiayaan *Murabahah* merupakan akad jual beli di mana koperasi menyediakan barang modal dan keuntungan ditentukan di awal sebagai margin, tanpa skema bagi hasil atau bagi rugi (KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, 2024).

Pembiayaan mempunyai manfaat serta fungsi berdasarkan misi pembiayaan yang didasarkan dengan prinsip-prinsip syariah yaitu tidak hanya untuk mencari keuntungan akan tetapi untuk menciptakan lingkungan usaha yang aman. Nurnasrina dan Putra (2018) menyebutkan fungsi pembiayaan sebagai berikut:

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak membebani debitur.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional, dikarenakan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Adapun manfaat dari pembiayaan antara lain:

- a. Manfaat bagi debitur
Kelebihan debitur yaitu pihak peminjam tidak dibebani dengan sejumlah bunga (riba) dan peminjam juga tidak mengembalikan pinjamannya dengan bagian keuntungan yang terlalu besar, namun

debitur harus memberikan bagian keuntungan yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

b. Manfaat bagi lembaga keuangan syariah

Keuntungan yang diperoleh oleh lembaga keuangan syariah adalah pihak bank akan menerima sebagian dari keuntungan peminjam, sehingga digunakan untuk mendukung kinerja operasional lembaga keuangan syariah. Dengan adanya pembiayaan ini, lembaga keuangan syariah berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan bisa menjalin silaturahmi antara nasabah dengan pihak lembaga keuangan syariah sendiri.

Setiap pengajuan kredit kepada lembaga keuangan harus melalui proses analisis kredit terlebih dahulu. Proses ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kelayakan kredit yang akan diberikan kepada calon debitur dan apakah kredit tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu keputusan kredit ditentukan oleh prinsip 5C (Supriyono, 2011). Menurut prinsip ini melibatkan lima elemen penting, yang terdiri atas:

a. *Character* (Karakter)

Prinsip karakter menggambarkan sifat dan kepribadian calon debitur yang memiliki niat baik untuk mengembalikan seluruh kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani bersama antara pihak debitur dan pihak kreditur.

b. *Capacity* (Kapasitas)

Prinsip kapasitas berkaitan dengan kemampuan calon debitur dalam melunasi pembiayaan. Pihak kreditur perlu menganalisis kondisi keuangan dan kemampuan calon debitur untuk memastikan pendapatan yang memadai guna membayar angsuran pembiayaan tepat waktu.

c. *Capital* (Modal)

Prinsip modal mengevaluasi jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur. Pihak kreditur harus memastikan bahwa calon debitur

memiliki modal atau ekuitas yang cukup untuk mendukung usaha atau proyek yang akan dibiayai melalui pembiayaan.

d. *Collateral* (Jaminan)

Prinsip jaminan berhubungan dengan aset atau agunan yang dapat dijadikan jaminan jika calon debitur. Agunan adalah jaminan yang diserahkan oleh calon debitur untuk pembiayaan yang diajukan. Jaminan hanya berfungsi sebagai solusi terakhir apabila debitur bermasalah tidak dapat mengembalikan kewajiban pinjaman.

e. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Prinsip kondisi mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat memengaruhi kemampuan calon debitur dalam melunasi pembiayaan. Pihak kreditur perlu menganalisis risiko terkait kondisi pasar, industri, serta situasi ekonomi secara keseluruhan untuk memastikan keberlanjutan dan kelangsungan usaha calon debitur.

9. Efektivitas Pembiayaan

Efektivitas adalah suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan dapat dicapai, baik dalam bentuk kuantitas maupun kualitas hasil yang diperoleh. Efektivitas tidak hanya melihat pada pencapaian hasil semata, tetapi juga pada sejauh mana hasil tersebut sesuai dengan rencana, sasaran, dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, efektivitas mencerminkan keberhasilan dalam melaksanakan perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu, di mana keberhasilan tersebut diukur dari tingkat kesesuaian antara hasil yang direncanakan dan hasil yang sebenarnya tercapai (Sundayana, 2018).

Efektivitas juga mencakup kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dengan optimal, sehingga hasil yang dicapai tidak hanya memenuhi target, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan. Efektivitas menilai seberapa baik sesuatu dilakukan atau diimplementasikan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan serta

bagaimana hasil tersebut dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan lain yang terkait (Cahyadi dan Windirah, 2021). Pembiayaan dianggap efektif jika dana yang disalurkan mampu mendukung peningkatan produktivitas, memperbaiki hasil usaha, dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi penerima serta lingkungan sekitarnya. Efektivitas pembiayaan juga mencerminkan seberapa baik pembiayaan tersebut diimplementasikan, apakah dana tersebut digunakan secara optimal sesuai rencana, dan apakah manfaat yang dihasilkan sebanding dengan target yang telah ditetapkan.

Efektivitas pemanfaatan pembiayaan dapat dilihat dari bagaimana dana yang diberikan kepada petani digunakan untuk meningkatkan penggunaan input usahatani sehingga menjadi lebih optimal. Pembiayaan tersebut dapat membantu petani mencapai hasil yang sesuai atau melebihi target produksi, serta memberikan manfaat jangka panjang seperti perbaikan infrastruktur pertanian atau peningkatan keterampilan petani (Prasetyo dan Supriyanto, 2022). Oleh karena itu, efektivitas pembiayaan tidak hanya diukur dari pencapaian target finansial saja, tetapi juga dari dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih luas, serta dari bagaimana pembiayaan tersebut mendukung tujuan jangka panjang yang lebih strategis. Salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas adalah adanya perilaku tidak konsekuen, yang dikenal dengan istilah *moral hazard*.

Perilaku *moral hazard* merupakan perilaku seorang individu atau lembaga yang tidak konsekuen secara penuh dan tidak bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya (Lestari dan Astuti, 2019). *Moral hazard* dalam dunia perbankan setidaknya dapat dibedakan atas 2 tingkatan, yaitu *Moral hazard* pada tingkat bank dan *moral hazard* pada tingkat nasabah. *Moral hazard* pada bank terjadi ketika bank syariah sebagai *mudharib* (pengelola) tidak berhati-hati dalam menyalurkan dana sehingga berpotensi menimbulkan *moral hazard* di sisi nasabah dan menyebabkan kerugian. *Moral hazard* pada nasabah umumnya terjadi pada produk

pembiayaan berbasis pada *equity financing* (*mudharabah* dan *musyarakah*) atau biasa dikenal dengan *profit loss sharing*. Akad *mudharabah* yang memberikan hak penuh pada *mudharib* (pengelola) untuk menjalankan usaha tanpa campur tangan *shahibul maal* (pemilik modal) yang mengakibatkan akad pembiayaan ini sangat rentan terhadap masalah *moral hazard* (Asmirawati dan Sumarlin, 2018).

Moral hazard merupakan salah satu risiko signifikan yang dihadapi oleh lembaga keuangan, termasuk koperasi syariah. Konsep ini merujuk pada situasi di mana penerima pembiayaan, bertindak kurang bertanggung jawab atau tidak jujur dalam memanfaatkan dana yang diperoleh. Perilaku tersebut sering terjadi ketika pengawasan terhadap penggunaan pembiayaan tidak dilakukan secara efektif. *Moral hazard* dapat muncul pada saat penggunaan dana pembiayaan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan tujuan awal. Lembaga keuangan syariah harus berupaya untuk menekan terjadinya *moral hazard* dengan melakukan monitoring terhadap penggunaan pembiayaan yang diberikan (Yoko, 2016).

10. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas analisis efektivitas pemanfaatan pembiayaan sektor pertanian dan pendapatan usahatani padi di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Pada penelitian ini, akan dianalisis bagaimana alokasi pembiayaan digunakan secara efektif dalam usahatani padi. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pendapatan yang diperoleh dari usahatani padi dan menganalisis pengaruh efektivitas pemanfaatan pembiayaan terhadap pendapatan tersebut. Pelaksanaan sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* juga dianalisis untuk menilai kesesuaiannya dengan akad yang telah disepakati di awal, sehingga penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian Yoko (2016) yang sama-sama menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mengestimasi jumlah pembiayaan pertanian yang direalisasikan petani pada usahatani padi. Penelitian Cahyani, Haryono, dan Marlina (2023) juga menganalisis pendapatan usahatani padi menggunakan metode kuantitatif yang diperoleh dari rumus pengurangan nilai total jual dari produksi usahatani padi setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam hitungan rupiah. Perbedaan penelitian ini yaitu pada penelitian Atin (2019) yang menganalisis pengaruh efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap peningkatan profit usaha mikro menggunakan variabel efektivitas ketepatan penggunaan dana, ketepatan jumlah kredit, ketepatan beban kredit, dan ketepatan prosedur, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan untuk melihat pengaruh variabel efektivitas pemanfaatan pembiayaan dan variabel jenis pembiayaan terhadap pendapatan usahatani padi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis pelaksanaan sistem bagi hasil yang bertujuan untuk menilai apakah proses bagi hasil yang dilakukan telah sesuai dengan akad yang disepakati di awal dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Penelitian ini tidak hanya memeriksa prosedur pelaksanaan, tetapi juga mengevaluasi transparansi, keadilan, perilaku dan moral yang muncul dalam praktik bagi hasil, serta memberikan wawasan baru yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya. Kajian penelitian terdahulu disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Kajian penelitian terdahulu

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Analisis permintaan pembiayaan pertanian syariah untuk usahatani padi di Kabupaten Lampung Tengah (Yoko, 2016)	<ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan petani terhadap pembiayaan pertanian syariah yang disalurkan oleh KJKS Mengestimasi jumlah pembiayaan pertanian yang direalisasikan petani pada usahatani padi 	<ol style="list-style-type: none"> Analisis regresi linier berganda Analisis deskriptif kuantitatif 	<ol style="list-style-type: none"> Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan petani terhadap pembiayaan pertanian KJKS adalah <i>cost of fund</i> dan pendapatan usahatani padi Terjadi <i>moral hazard</i> dalam realisasi pembiayaan pertanian, dimana pembiayaan pertanian yang diperoleh petani belum sepenuhnya diaplikasikan dalam kegiatan usahatani padi
2	Pengaruh efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap peningkatan profit usaha mikro (studi kasus pada nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta) (Atin, 2019).	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengaruh efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap peningkatan profit usaha mikro pada nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta.	Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BRI Unit Purwomartani telah berjalan secara efektif dan menunjukkan bahwa efektivitas ketepatan penggunaan dana, jumlah kredit, beban kredit, dan prosedur berpengaruh secara signifikan positif terhadap peningkatan profit usaha.

Tabel 5. Lanjutan

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
3	Efektivitas pembiayaan agribisnis mangga (<i>mangifera indica l.</i>) (program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia (BRI) studi kasus di Desa Gumulung Tonggoh Kecamatan Gregeh Kabupaten Cirebon) (Dwirayani, dan Jaeroni, 2020).	Mengkaji efektifitas pembiayaan KUR BRI pada petani mangga.	Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif menggunakan skala likert	Efektivitas pembiayaan program KUR dari BRI yang diberikan kepada nasabah petani mangga di Desa Gumulung Tonggoh sudah efektif. Hal ini dilihat dari aspek pengajuan pembiayaan, pencairan, pengembalian dan dampak kepada petani. Akan tetapi ada satu aspek yaitu pemanfaatan pembiayaan yang kurang efektif dan harus ditingkatkan.
4	Analisis pendapatan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani (kasus petani padi organik dan anorganik di Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu) (Triana, Haryono, dan Hasanuddin, 2020).	Menganalisis tingkat pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga petani padi organik dan anorganik di Kecamatan Pringsewu dan Pardasuka.	Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif	Rata-rata pendapatan rumah tangga petani padi organik dan anorganik di Kecamatan Pringsewu dan Pardasuka masing-masing sebesar Rp21.520.505,88 per tahun dan Rp18.785.344,38 per tahun. Berdasarkan kriteria BPS (2014) sebanyak 88,24 persen dan 70 persen rumah tangga petani padi organik dan anorganik termasuk kategori sudah sejahtera.

Tabel 5. Lanjutan

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
5	Efektivitas penerapan pembiayaan <i>musyarakah</i> pada <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) BIMA Kota Magelang (Fadlillah dan Khotijah, 2021)	Mengetahui efektivitas prosedur pembiayaan <i>musyarakah</i> pada BMT BIMA Kota Magelang.	Analisis deskriptif kualitatif.	Pembiayaan syariah dengan prinsip <i>musyarakah</i> pada BMT dilakukan secara efektif karena telah melakukan proses pembiayaan sesuai prinsip dan ketentuan syariah yakni terdapat proses ijab qabul antara nasabah dengan pihak BMT, terdapat pihak yang melakukan kontrak, terdapat objek kesepakatan modal dan terdapat nisbah pembagian hasil keuntungan dan kerugian secara jelas.
6	Efektivitas pembiayaan agribisnis BPRS dalam meningkatkan pendapatan hasil pertanian nasabah di Kabupaten Serdang Bedagai (studi kasus pada PT. BPRS Al-Wahsliyah Medan) (Lubis, 2021).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui prosedur pembiayaan agribisnis pada PT. BPRS Al-Wahsliyah Medan 2. Mengetahui keuntungan dan resiko dalam pembiayaan agribisnis pada PT. BPRS Al-Wahsliyah Medan 3. Mengetahui efektivitas dalam meningkatkan hasil pertanian nasabah dan efektivitas dari pembiayaan agribisnis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis deskriptif kualitatif 2. Analisis deskriptif kualitatif 3. Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pembiayaan agribisnis pada PT. BPRS Al-Wahsliyah terdapat beberapa tahapan yaitu: pemenuhan persyaratan administratif, proses pencairan dana, dan pengembalian pembiayaan agribisnis 2. Keuntungan bagi nasabah yaitu dapat mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian. PT. BPRS Al-Wahsliyah memperoleh

Tabel 5. Lanjutan

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				keuntungan dari pembagian bagi hasil. Terdapat risiko yang harus dihadapi, seperti kegagalan panen, lambatnya pengembalian dana, dll.
				3. Pembiayaan agribisnis di PT. BPRS Al-Wahsliyah Medan efektif dalam meningkatkan hasil pertanian nasabah, terbukti dengan peningkatan omset sebesar 60 persen hingga 100 persen. Bagi PT. BPRS Al-Wahsliyah Medan, efektivitas pembiayaan ini terlihat dari pertumbuhan keuntungan bagi hasil yang mendukung operasional perusahaan, meskipun jumlah nasabah agribisnis masih relatif sedikit.
7	Efektivitas pembiayaan akad <i>mudharabah</i> BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam solusi pemulihan ekonomi masyarakat (Maulidi dan Rahman, 2021)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui implementasi pembiayaan akad <i>mudharabah</i> pada BPRS Bhakti Sumekar 2. Mengetahui efektivitas pembiayaan akad 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis deskriptif kualitatif 2. Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif 	1. Implementasi pembiayaan <i>mudharabah</i> menerapkan prinsip-prinsip yang tertuang di dalam Fatwa DSN MUI tentang <i>mudharabah</i> yaitu dana yang disalurkan oleh LKS untuk suatu usaha produktif

Tabel 5. Lanjutan

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		<i>mudharabah</i> pada BPRS Bhakti Sumekar		2. Pembiayaan <i>mudharabah</i> yang diberikan BPRS Bhakti Sumekar sudah berjalan secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan belum pernah ada nasabah yang bangkrut, rata-rata UMKM yang mendapatkan pembiayaan dapat Memberikan nisbah dengan baik dan mengembalikan modal pokok sesuai tempo.
8	Analisis pendapatan usahatani padi pada program petani makmur di Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang (Prastami, Abubakar, dan Afifah, 2021)	Menganalisis pendapatan usahatani padi pada program petani makmur di Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang.	Analisis kuantitatif penerimaan dan pendapatan usahatani padi	Hasil usahatani padi di Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang pada musim tanam ke dua sebelum mengikuti program makmur didapatkan rata-rata penerimaan sebesar Rp20.222.560,98/ha/MT meningkat menjadi Rp21.155.081,30/ha/MT setelah mengikuti program makmur. Rata-rata pendapatan sebelum Program Makmur Rp7.165.567,07/ha/MT meningkat menjadi

Tabel 5. Lanjutan

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				Rp8.112.794,72/ha/MT. Oleh karena itu, usahatani padi dapat dilaksanakan karena layak untuk diusahakan.
9	Analisis Produksi dan Pendapatan Usahatani Padi di Kabupaten Lampung Tengah (Sukmayanto, Hasanuddin, dan Listiana, 2022).	<ol style="list-style-type: none"> Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usahatani padi Menganalisis pendapatan usahatani padi. 	<ol style="list-style-type: none"> Fungsi produksi Cobb-Dougllass Analisis kuantitatif pendapatan usahatani padi 	<ol style="list-style-type: none"> Variabel benih, pupuk urea, pupuk NPK, pupuk kandang, tenaga kerja, dan luas lahan berpengaruh nyata terhadap produksi padi, sedangkan pupuk KCL dan pupuk SP36 tidak berpengaruh nyata terhadap produksi padi. Pendapatan rata-rata usahatani padi atas biaya total per musim tanam sebesar Rp13,258,682.47/ha dengan R/C sebesar 2,36 yang artinya usahatani padi telah menguntungkan.
10	Analisis efisiensi produksi dan pendapatan usahatani padi sawah di Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara (Tambunan, Lestari, dan Prasmatiwi, 2022).	<ol style="list-style-type: none"> Menganalisis tingkat efisiensi produksi usahatani padi sawah Menganalisis pendapatan usahatani padi sawah 	<ol style="list-style-type: none"> Fungsi produksi <i>frontier Cobb-Dougllass</i> Analisis kuantitatif pendapatan petani 	<ol style="list-style-type: none"> Usahatani padi sawah di Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara pada musim tanam I belum efisien secara teknis, namun sangat efisien secara harga dan ekonomis. Pendapatan rata-rata usahatani padi atas biaya

Tabel 5. Lanjutan

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
				total sebesar Rp,9.649.140,63/ha dengan R/C sebesar 2,66 yang artinya usahatani padi telah menguntungkan.
11	Pemanfaatan pembiayaan perbankan syariah dalam meningkatkan produktivitas usaha <i>home</i> industri romli (Astutik, dan Suliyono, 2023).	Mengetahui upaya yang dilakukan oleh home industri romli dalam memanfaatkan pembiayaan perbankan syariah untuk meningkatkan produktivitasnya.	Analisis deskriptif kualitatif	Home industri Romli telah memanfaatkan pembiayaan <i>mudharabah</i> pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tangerang 2 dimana prinsip akadnya mengatur harga dan keuntungan disepakati antara dua belah pihak dan dijelaskan dengan rinci. Keuntungan dihitung dengan cara bagi hasil yang berbentuk skema alternatif dan memiliki karakteristik sangat berbeda dibandingkan bunga.
12	Analisis pendapatan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani kubis di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat (Cahyani <i>et al.</i> , 2023).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis pendapatan usahatani 2. Menganalisis tingkat pendapatan rumah tangga petani 3. Menganalisis pengeluaran rumah tangga petani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis kuantitatif pendapatan petani 2. Analisis kuantitatif pendapatan rumah tangga petani 3. Analisis kuantitatif pengeluaran rumah tangga petani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usahatani kubis yang dijalankan oleh petani menguntungkan karena nilai R/C dari total biaya lebih dari satu ($RC > 1$) 2. Pendapatan rumah tangga petani kubis dalam setahun terdiri dari pendapatan <i>on-farm</i> kubis sebesar

Tabel 5. Lanjutan

No	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
4.	Menganalisis tingkat kesejahteraan rumah tangga petani	4 Nilai tukar pendapatan rumah tangga petani (NTPRP)	<p data-bbox="1563 312 1944 600">Rp56.191.647,06, pendapatan <i>on-farm</i> non kubis sebesar Rp14.862.745,10, pendapatan <i>off-farm</i> sebesar Rp1.690.196,08, dan pendapatan <i>non-farm</i> sebesar Rp2.531.764,71.</p> <p data-bbox="1525 608 1944 935">3. Pengeluaran rumah tangga petani kubis dalam setahun terdiri dari pengeluaran pangan sebesar Rp1.946.747,06 dan pengeluaran non pangan sebesar Rp14.625.411,76 total sebesar Rp,9.649.140,63/ha</p> <p data-bbox="1525 943 1944 1080">4. Nilai tukar pendapatan rumah tangga petani termasuk dalam kategori sejahtera</p>	

Tabel 6. Matriks metode yang diadopsi dari penelitian terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Tujuan 1	Tujuan 2	Tujuan 3	Tujuan 4
1	Yoko, 2016	√			
2	Atin, 2019			√	
3	Dwirayani, dan Jaeroni, 2020				√
4	Triana <i>et al.</i> , 2020.		√		
5	Fadlillah dan Khotijah, 2021				√
6	Lubis, 2021				√
7	Maulidi dan Rahman, 2021				√
8	Prastami, Abubakar, dan Afifah, 2021		√		
9	Sukmayanto <i>et al.</i> , 2022		√		
10	Tambunan <i>et al.</i> , 2022		√		
11	Astutik, dan Suliyono, 2023				√
12	Cahyani <i>et al.</i> , 2023		√		

B. Kerangka Pemikiran

Koperasi merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai salah satu subsistem penunjang dalam perekonomian, memberikan akses pembiayaan serta layanan keuangan bagi anggotanya. Koperasi berperan penting dalam mengumpulkan dana dari anggotanya dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan guna mendukung keperluan produktif, seperti usahatani, perdagangan, atau usaha lainnya. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui akses ke sumber daya keuangan yang lebih mudah, dengan biaya lebih rendah dan syarat yang lebih fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional (Perkasa, dan Siregar, 2023). Pengelolaan dana yang tidak efisien dapat menyebabkan keterlambatan pencairan atau penyaluran pembiayaan yang tidak tepat. Masalah lain adalah kesulitan dalam pengembalian pinjaman dari anggota, terutama jika usaha mengalami kerugian. Kurangnya pemahaman anggota mengenai manajemen keuangan juga dapat menghambat pemanfaatan pembiayaan secara optimal (Damayanti, 2016). Tantangan-tantangan ini menghalangi koperasi mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota secara berkelanjutan.

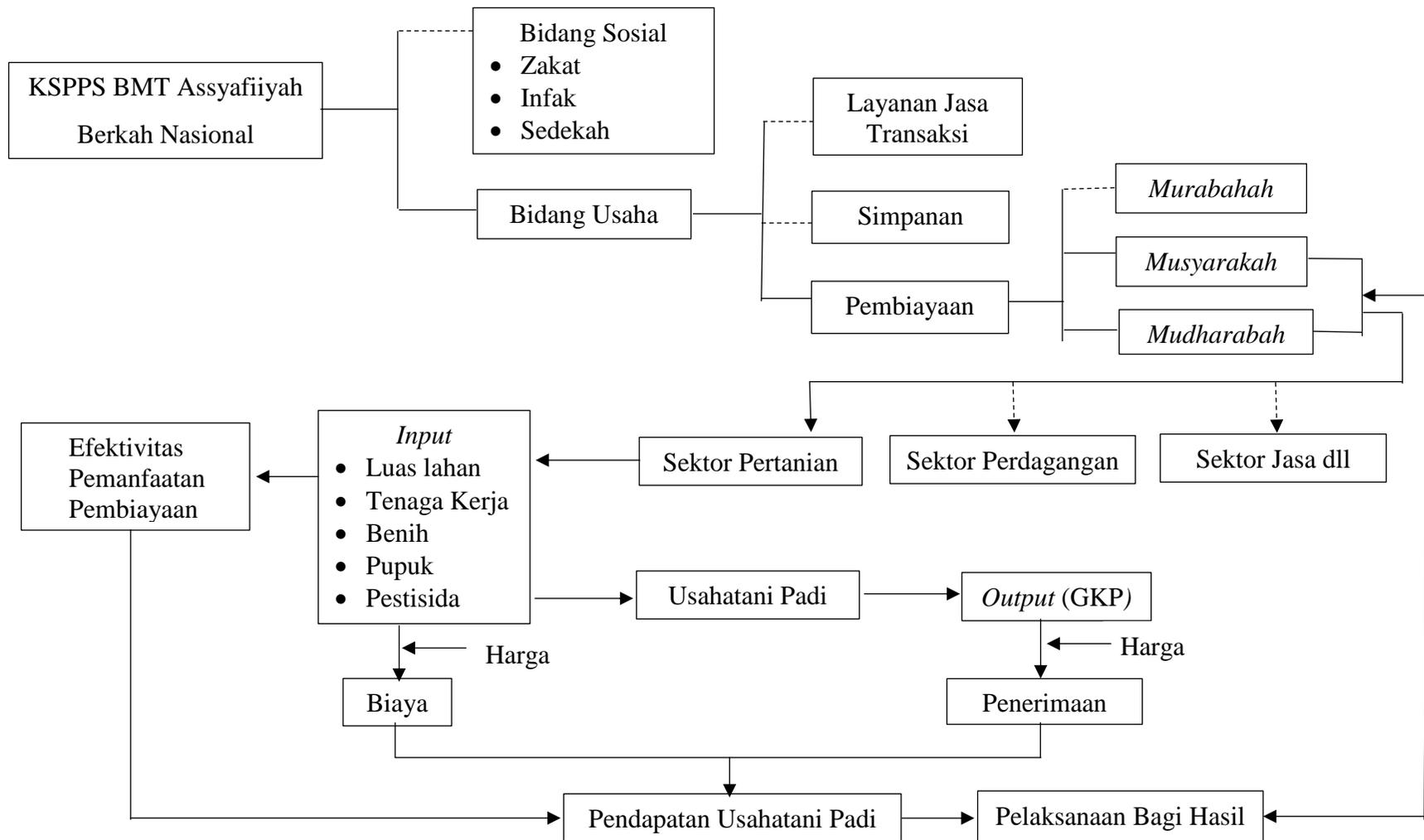
KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas adalah lembaga keuangan syariah yang berfokus pada penghimpunan dan penyaluran modal untuk mendukung usaha anggota melalui pembiayaan berbasis syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. KSPPS tersebut beroperasi dengan prinsip keadilan dan transparansi, keputusan pembiayaan diambil berdasarkan analisis risiko serta potensi keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak. Adanya pembiayaan pertanian dari KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas diharapkan mampu meningkatkan penggunaan input produksi menjadi efisien, sehingga produksi dan produktivitas usahatani meningkat dan pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan usahatani padi di Cabang Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.

Pembiayaan sektor pertanian ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani melalui skema pembiayaan syariah, terutama pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan tersebut menekankan pada prinsip bagi hasil, yaitu ketika koperasi dan petani berbagi keuntungan dan risiko berdasarkan kesepakatan bersama.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* menjadi fokus utama karena lebih cocok diterapkan pada sektor pertanian yang penuh dengan ketidakpastian dan fluktuasi pendapatan. Komponen-komponen pada sektor pertanian dalam pembiayaan ini meliputi *input* produksi seperti luas lahan, tenaga kerja, benih, pupuk, dan pestisida yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas usahatani padi. Hasil produksi padi berupa Gabah Kering Panen (GKP) yang menjadi tolak ukur dalam menentukan pendapatan usahatani padi.

Efektivitas pemanfaatan pembiayaan sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan secara optimal, khususnya untuk sarana produksi pertanian dalam usahatani padi. Pada penelitian ini, alokasi dana dari skema pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diambil oleh anggota koperasi akan dianalisis untuk menentukan persentase yang benar-benar digunakan untuk keperluan usahatani padi. Penelitian ini akan mengevaluasi seberapa efektif petani memanfaatkan dana tersebut dan mengukur pengaruhnya terhadap pendapatan usahatani padi. Analisis pelaksanaan sistem bagi hasil pada penelitian ini untuk menilai apakah distribusi keuntungan/kerugian sesuai dengan akad yang telah disepakati di awal. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan bersifat adil dan transparan bagi kedua belah pihak.

Kerangka berpikir untuk analisis efektivitas pembiayaan sektor pertanian dan pendapatan usahatani padi di Cabang Kota Gajah KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka pemikiran analisis efektivitas pemanfaatan pembiayaan sektor pertanian dan pendapatan usahatani padi di KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah

C. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu diduga efektivitas pemanfaatan pembiayaan sektor pertanian (X1) dan jenis pembiayaan (D1) berpengaruh positif terhadap pendapatan usahatani padi (Y) di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. Studi kasus merupakan metode penelitian untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang suatu subjek penelitian untuk menjelaskan secara rinci bagaimana subjek tersebut bekerja atau berfungsi (Alwasilah, 2015). Studi kasus merupakan rancangan penelitian yang mencakup pengkajian satu unit penelitian secara intensif, terperinci, dan mendalam dalam suatu program dan aktivitas misalnya satu klien, keluarga, kelompok, komunitas, atau institusi (Rofiah, 2023).

B. Definisi Operasional

Konsep dasar dan batasan operasional mencakup pengertian yang digunakan untuk menunjang dan menciptakan data akurat yang kemudian dianalisis yang berhubungan dengan penelitian.

Sektor pertanian adalah salah satu sektor ekonomi yang mencakup berbagai kegiatan yang berkaitan dengan produksi, pengolahan, dan distribusi hasil pertanian.

Petani padi adalah individu atau kelompok orang yang melakukan kegiatan usahatani padi dengan tujuan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan hidupnya.

Usahatani padi adalah serangkaian aktivitas yang berfokus untuk menghasilkan produksi padi yang kemudian dijadikan sebagai sumber penerimaan usaha yang dilakukan petani padi.

Luas lahan tanaman padi adalah areal atau tempat yang digunakan untuk melakukan usahatani padi di atas sebidang tanah, yang diukur dalam satuan hektar (ha).

Tenaga kerja merupakan daya manusia untuk melakukan serangkaian kegiatan yang diperlukan untuk berbagai macam keperluan. Jenis tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja manusia, ternak, dan mekanik. Tenaga kerja manusia dibedakan atas tenaga kerja pria, wanita, dan anak-anak. Ukuran tenaga kerja biasanya dinyatakan dalam satuan Hari Orang Kerja (HOK).

Benih adalah gabah yang dipanen dan digunakan sebagai input dalam usahatani. Terdapat tiga varietas utama, yaitu varietas hibrida, varietas unggul, dan varietas lokal.

Varietas hibrida adalah hasil persilangan di antara dua atau lebih populasi yang spesies dan genetiknya berbeda. Penggunaan varietas hibrida diukur dalam satuan kilogram (Kg).

Varietas unggul adalah varietas padi yang merupakan hasil persilangan varietas unggul padi lokal. Terdapat beberapa varietas unggul, diantaranya adalah Ciherang, Inpari 32, Mapan, dll. Penggunaan varietas unggul diukur dalam satuan kilogram (Kg).

Varietas lokal adalah jenis varietas yang berasal dari suatu daerah yang telah lama beradaptasi serta memiliki nilai keunggulannya dan kelemahannya tersendiri. Penggunaan varietas lokal diukur dalam satuan kilogram (Kg).

Pupuk NPK Phonska adalah pupuk yang mengandung Nitrogen (N), Fosfor (P), dan Kalium (K) yang digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman. Penggunaan pupuk NPK Phonska diukur dalam satuan kilogram (Kg).

Pupuk TSP adalah pupuk yang mengandung fosfor (P) yang digunakan untuk meningkatkan ketersediaan fosfor dalam tanah yang penting untuk pertumbuhan akar, pembentukan bunga, dan perkembangan biji. Penggunaan pupuk TSP diukur dalam satuan kilogram (Kg).

Pupuk KCL adalah pupuk yang mengandung kalium (K) dalam bentuk kalium klorida, yang digunakan untuk memperbaiki kualitas hasil pertanian, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit, serta memperkuat struktur sel tanaman. Penggunaan pupuk KCL diukur dalam satuan kilogram (Kg).

Pupuk Urea adalah pupuk nitrogen (N) yang mengandung unsur nitrogen tinggi, yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan vegetatif tanaman, seperti daun dan batang. Pupuk ini sering digunakan pada fase pertumbuhan awal tanaman. Penggunaan pupuk urea diukur dalam satuan kilogram (Kg).

Pestisida adalah zat kimia beracun yang digunakan petani untuk membasmi atau mengendalikan serangan hama yang dapat merusak tanaman padi. Pestisida terdiri dari beberapa jenis, seperti insektisida, herbisida, dan fungisida.

Insektisida adalah jenis pestisida yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan hama dan serangga yang dapat merusak tanaman. Insektisida dapat berupa cair atau padat. Penggunaan insektisida cair diukur dalam satuan liter (L), sedangkan insektisida padat diukur dalam satuan kilogram (Kg).

Herbisida adalah jenis pestisida yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan gulma (tanaman pengganggu). Herbisida dapat berupa cair atau padat. Penggunaan herbisida cair diukur dalam satuan liter (L), sedangkan herbisida padat diukur dalam satuan kilogram (Kg).

Fungisida adalah jenis pestisida yang digunakan untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh jamur pada tanaman. Fungisida dapat berupa cair atau padat. Penggunaan fungisida cair diukur dalam satuan liter (L), sedangkan fungisida padat diukur dalam satuan kilogram (Kg).

Harga pupuk NPK Phonska adalah harga yang dibayarkan oleh petani untuk satu kilogram pupuk NPK Phonska. Harga ini dinyatakan dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/kg).

Harga pupuk TSP adalah harga yang dibayarkan oleh petani untuk satu kilogram pupuk TSP. Harga ini dinyatakan dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/kg).

Harga pupuk KCL adalah harga yang dibayarkan oleh petani untuk satu kilogram pupuk KCL. Harga ini dinyatakan dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/kg).

Harga pupuk Urea adalah harga yang dibayarkan oleh petani untuk satu kilogram pupuk urea. Harga ini dinyatakan dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/kg).

Harga insektisida adalah biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk membeli pestisida jenis insektisida. Harga insektisida cair dinyatakan dalam satuan rupiah per liter (Rp/L), sedangkan harga insektisida padat dinyatakan dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/Kg).

Harga herbisida adalah biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk membeli pestisida jenis herbisida. Harga herbisida cair dinyatakan dalam satuan rupiah per liter (Rp/L), sedangkan harga herbisida padat dinyatakan dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/Kg).

Harga fungisida adalah biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk membeli pestisida jenis fungisida. Harga fungisida cair dinyatakan dalam satuan rupiah per liter (Rp/L), sedangkan harga fungisida padat dinyatakan dalam satuan rupiah per kilogram (Rp/Kg).

Alat-alat pertanian adalah barang yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan petani selama melakukan kegiatan usahatani. Terdapat dua jenis alat pertanian, yaitu alat modern seperti bajak dan traktor, serta alat tradisional seperti cangkul, arit, dan garu.

Biaya penyusutan adalah nilai beli dikurangi nilai sisa kemudian dibagi dengan umur ekonomis alat tersebut dan diukur dalam satuan rupiah per musim tanam (Rp/MT).

Biaya total adalah jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan, baik biaya tunai maupun biaya diperhitungkan untuk memproduksi pada usahatani padi yang dijalankan, dan diukur dalam satuan rupiah per musim tanam (Rp/ MT).

Biaya tunai adalah biaya yang secara nyata dikeluarkan oleh petani untuk melakukan kegiatan usahatani dalam satu kali periode musim tanam yang diukur dalam satuan rupiah per musim tanam (Rp/ MT).

Biaya diperhitungkan adalah biaya yang tidak dikeluarkan secara tunai dalam kegiatan usahatani, tetapi dimasukkan dalam komponen biaya, seperti biaya tenaga kerja dalam keluarga dan penyusutan alat yang diukur dalam satuan rupiah per musim tanam (Rp/MT).

Hasil produksi padi berupa Gabah Kering Panen (GKP) adalah jumlah padi yang dipanen dari sawah, diukur dalam kilogram (Kg). GKP merupakan hasil panen awal sebelum pengeringan dan penggilingan.

Harga jual padi adalah harga yang diterima oleh petani atas penjualan hasil panen yang diukur dalam satuan rupiah/kilogram (Rp/Kg) GKP.

Penerimaan adalah hasil yang diperoleh petani padi dengan cara mengalikan jumlah produksi dengan harga jual. Penerimaan diukur dalam satuan rupiah per musim tanam (Rp/MT).

Jumlah Produksi adalah total hasil panen padi yang diperoleh petani dalam satu musim tanam, biasanya diukur dalam satuan kilogram (kg) atau ton.

Harga Jual adalah nilai atau harga per satuan hasil panen (misalnya per kilogram) yang diterima petani saat menjual hasil produksinya, dinyatakan dalam satuan rupiah (Rp/kg).

Pendapatan usahatani padi adalah selisih total penerimaan dengan total biaya (TR-TC). Pendapatan diukur dalam satuan rupiah per musim tanam (Rp/MT).

Koperasi adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi syariah adalah sebuah badan usaha atau badan hukum berbasis kekeluargaan yang aktivitas dan tujuan di dalamnya menganut prinsip syariah, sehingga dijalankan sesuai dengan syariat agama Islam. Hal ini termasuk aktivitas keuangan seperti simpan pinjam, pembiayaan, dan investasi yang keuntungannya menerapkan sistem bagi hasil.

KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah memiliki fungsi sebagai *Baitul Tamwil* dan *Baitul Maal*. *Baitul Tamwil* bergerak mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas usaha mikro dan kecil anggota dengan mendorong kegiatan menyimpan dan menabung serta pembiayaan ekonomi.

Anggota koperasi adalah orang-orang yang dengan keinginannya sendiri mendaftar sebagai anggota koperasi dan bersedia memberikan kontribusinya terhadap koperasi.

Pembiayaan adalah sejumlah dana yang diberikan oleh koperasi kepada anggota yang memenuhi syarat dengan tujuan untuk membiayai kegiatan ekonomi produktif, konsumsi, atau investasi berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip koperasi.

Pembiayaan *mudharabah* adalah bentuk pembiayaan di mana satu pihak sebagai pemilik modal (koperasi) menyediakan seluruh modal, sementara pihak lain sebagai pengelola (anggota petani) bertanggung jawab dalam pengelolaan usahatani. Keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal.

Pembiayaan *musyarakah* adalah bentuk pembiayaan di mana dua atau lebih pihak bekerja sama dengan menggabungkan modal untuk menjalankan usaha bersama. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang proporsional dengan kontribusi modal masing-masing, sementara kerugian ditanggung sesuai dengan persentase kontribusi modal.

Pemanfaatan adalah proses atau tindakan menggunakan sesuatu dengan cara yang optimal untuk mencapai tujuan tertentu. Anggota koperasi memanfaatkan pembiayaan yang disediakan oleh koperasi yang mencakup pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Efektivitas pembiayaan *mudharabah* adalah tingkat pemanfaatan pembiayaan untuk kegiatan usahatani padi, yang diukur berdasarkan persentase alokasi pembiayaan dari modal yang sepenuhnya disalurkan oleh pihak koperasi (%).

Efektivitas pembiayaan *musyarakah* adalah tingkat pemanfaatan pembiayaan untuk kegiatan usahatani padi, yang diukur berdasarkan persentase alokasi pembiayaan dari modal yang disalurkan oleh pihak koperasi (sebagian) dan total modal yang digunakan untuk usahatani padi (gabungan modal koperasi dan anggota) (%).

Bagi hasil adalah mekanisme pembagian keuntungan antara pihak penyedia modal dan pengelola usaha berdasarkan nisbah atau rasio yang telah disepakati di awal akad. Keuntungan yang diperoleh dari usaha yang didanai akan dibagi sesuai dengan nisbah tersebut.

Sistem bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* ditentukan berdasarkan kesepakatan antara koperasi dan anggota, dengan persentase yang bervariasi antar anggota, seperti 20:80, 30:70, 40:60, atau 50:50.

Sistem bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* ditentukan berdasarkan kesepakatan yang proporsional dengan kontribusi modal antara koperasi dan anggota. Persentase ini dapat bervariasi antar anggota, seperti 20:80, 30:70, 40:60, atau 50:50.

C. Lokasi, Responden, dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Pemilihan dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah merupakan cabang pertama yang melayani pembiayaan anggota khususnya petani padi. KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas merupakan salah satu koperasi primer berstandar

nasional sebagai lembaga keuangan mikro syariah *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul tamwil* bergerak mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas usaha mikro dan kecil anggota dengan mendorong kegiatan menyimpan dan menabung serta pembiayaan ekonomi. KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas juga menjadi pelopor dan tokoh penggerak dalam perkembangan koperasi di Provinsi Lampung (KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas, 2024).

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari anggota yang menggunakan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Populasi penelitian petani padi yang melakukan pembiayaan *mudharabah* pada musim periode Januari-Maret 2024 di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas sebanyak 117 anggota. Adapun jumlah sampel yang diambil pada pembiayaan *mudharabah* dapat ditentukan menggunakan teori Isaac dan Michael (Subhaktiyasa, 2024) dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{NZ^2S^2}{Nd^2 + Z^2S^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

S^2 = Variasi sampel (5 persen = 0,05)

Z = Tingkat kepercayaan (95 persen = 1,96)

d = Derajat penyimpangan (5 persen = 0,05)

Maka perhitungan sampel anggota pada pembiayaan *mudharabah* adalah:

$$n = \frac{NZ^2S^2}{Nd^2 + Z^2S^2}$$

$$n = \frac{117 \cdot (1,96)^2 \cdot 0,05}{117 \cdot (0,05)^2 + (1,96)^2 \cdot 0,05}$$

$$n = \frac{22,47}{0,48} = 46,81 \approx 47$$

Berdasarkan rumus tersebut, didapatkan bahwa jumlah sampel yaitu sebanyak 47 responden. Adapun teknik sampling yang digunakan adalah *probability*

sampling dengan *simple random sampling* (metode acak sederhana). Teknik *simple random sampling* adalah sistem pengambilan sampel yang dilakukan secara acak oleh semua individu dalam populasi (anggota populasi) diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel (Susanti, 2005). Caranya adalah semua anggota populasi dicatat dan diberi nomor urut, kemudian nomor-nomor inilah yang diundi untuk dijadikan anggota sampel yang dibutuhkan (Kusumastuti, Khorion, dan Achmadi, 2020).

Populasi penelitian petani padi yang melakukan pembiayaan *musyarakah* pada musim periode Januari-Maret 2024 sebanyak 45 anggota. Oleh karena itu, pada pembiayaan *musyarakah* dilakukan dengan metode sensus. Metode sensus merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil seluruh populasi sebagai sampel. Jadi, total responden pada penelitian ini adalah sebanyak 92 anggota koperasi. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari-Februari 2025.

D. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Data primer didapat dari sumber informasi melalui pengamatan langsung, diskusi, wawancara yang dilakukan dengan pengurus, karyawan dan anggota KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas yang berpedoman pada kuesioner yang disesuaikan untuk menjawab masalah penelitian terhadap anggota KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas. Kuesioner merupakan daftar pernyataan atau pertanyaan yang dikirimkan kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan (Hermawan dan Amirullah, 2016). Pada penelitian ini peneliti melakukan interview dengan memberikan daftar pertanyaan terbuka kepada responden. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kumpulan-kumpulan literatur atau referensi dan beberapa sumber lain yang memiliki kaitan dengan objek penelitian. Data sekunder juga bersumber dari berbagai berbagai kepustakaan dan instansi-instansi pemerintah yang terkait dalam

penelitian ini, seperti data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), BPS Indonesia, BPS Provinsi Lampung, BPS Kabupaten Lampung Tengah, BPS Kecamatan Kota Gajah, lembaga terkait, publikasi, jurnal-jurnal dan pustaka lainnya.

E. Metode Analisis Data

1. Analisis Efektivitas Pemanfaatan Pembiayaan Sektor Pertanian

Analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase penggunaan pembiayaan sektor pertanian yang dialokasikan untuk kegiatan usahatani padi. Metode yang digunakan untuk menjawab tujuan tersebut adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Melalui pendekatan ini, data kuantitatif mengenai alokasi pembiayaan diolah untuk menggambarkan proporsi pembiayaan sektor pertanian yang secara khusus dimanfaatkan oleh petani padi. Pengukuran efektivitas didapatkan berdasarkan hasil persentase penggunaan pembiayaan oleh anggota dengan pengkategorian sebagai berikut:

Tabel 7. Pengkategorian skor efektivitas pemanfaatan pembiayaan

No	Persentase (%)	Keterangan
1	0-20	Tidak Efektif
2	21-40	Kurang Efektif
3	41-60	Cukup Efektif
4	61-80	Efektif
5	80-100	Sangat Efektif

2. Analisis Pendapatan Usahatani Padi

Tujuan penelitian yang ke dua yaitu menganalisis pendapatan usahatani padi. Pada penelitian ini analisis biaya dilakukan dengan menghitung biaya yang benar-benar dikeluarkan dalam usahatani padi. Biaya total merupakan penjumlahan seluruh biaya yang dikeluarkan baik untuk biaya tetap maupun biaya variabel. Menurut Suratiyah (2015) biaya total ditentukan dengan rumus:

$$TC = TFC + TVC$$

Keterangan:

TC = Biaya total usahatani padi (Rp/MT)

TFC = Total biaya tetap usahatani padi (Rp/MT)

TVC = Total biaya variabel usahatani padi (Rp/MT)

Secara matematis untuk menghitung penerimaan usahatani padi menurut Suratiyah (2015) dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$TR = P_y \cdot Y$$

Keterangan:

TR = Total *revenue*/total penerimaan usahatani padi (Rp/MT)

P_y = Harga padi GKP (Rp/Kg)

Y = Jumlah produksi padi (Kg)

Menurut Suratiyah (2015) pendapatan adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya usahatani padi. Pendapatan usahatani padi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\pi = TR - TC$$

Keterangan:

π = Pendapatan usahatani padi (Rp/MT)

TR = Total *revenue*/total penerimaan usahatani padi (Rp/MT)

TC = Total *cost*/total biaya usahatani padi (Rp/MT)

Kegiatan usahatani yang dilakukan oleh petani perlu dilakukan analisis R/C untuk mengetahui apakah usahatani tersebut menguntungkan atau merugikan. Analisis *Return Cost Ratio* (R/C) merupakan perbandingan (*ratio* atau *nisbah*) antara penerimaan (*revenue*) dengan biaya (*cost*).

Menurut Yusriadi dan Irwan (2022) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$R/C = \frac{TR}{TC}$$

Keterangan:

R/C = Nisbah penerimaan dan biaya

TR = Total *revenue* (total penerimaan) usahatani padi

TC = Total *cost* (total biaya) usahatani padi

Kriteria pengambilan keputusan untuk mengetahui usahatani padi yang dijalankan oleh petani menguntungkan atau tidak, dapat dilihat dari nilai R/C. Besarnya suatu nilai R/C dapat memberikan tiga kemungkinan yang akan terjadi yaitu sebagai berikut:

- a. Jika nilai $R/C > 1$, maka usahatani padi yang dijalankan oleh petani mengalami keuntungan karena penerimaan yang diterima lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.
- b. Jika nilai $R/C < 1$, maka usahatani padi yang dijalankan oleh petani mengalami kerugian karena penerimaan yang diterima lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan.
- c. Jika nilai $R/C = 1$, maka usahatani padi yang dijalankan oleh petani tidak mengalami keuntungan atau kerugian (impas) karena penerimaan yang diterima sama dengan biaya yang dikeluarkan.

3. Analisis Pengaruh Efektivitas Pemanfaatan Pembiayaan dan Jenis Pembiayaan terhadap Pendapatan Usahatani Padi

Metode yang digunakan untuk menjawab tujuan ke tiga yaitu metode analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel terikat (variabel dependen) dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya, di mana terdapat lebih dari satu variabel bebas (variabel independen) (Suyono, 2018). Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dalam hal ini efektivitas pemanfaatan pembiayaan, dan jenis pembiayaan yang dapat memengaruhi pendapatan usahatani padi. Penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bX_1 + d_1D_1 + e$$

Keterangan:

- Y = Pendapatan usahatani padi (Rp/MT)
 a = Konstanta
 b = Koefisien regresi
 X₁ = Efektivitas pemanfaatan pembiayaan (%)

- D1 = Jenis Pembiayaan
 D1 = 1 jika *mudharabah*, D1 = 0 jika *musyarakah*
 e = Faktor kesalahan

A. Uji Asumsi Klasik

Metode regresi linier berganda terdapat salah satu syarat yang harus terpenuhi salah satunya yaitu asumsi klasik. Uji asumsi klasik tersebut meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Model regresi akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) yakni tidak terdapat heteroskedastisitas, tidak terdapat multikolinearitas, dan tidak terdapat autokorelasi (Sunyoto, 2012).

1. Uji Normalitas

Menurut Gujarati dan Porter (2009), Teorema Limit Tengah (*Central Limit Theorem/CLT*) menyatakan bahwa ketika ukuran sampel cukup besar, distribusi rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal, terlepas dari bentuk distribusi populasi asalnya. Artinya, meskipun data populasi awal tidak berdistribusi normal, rata-rata dari sampel acak yang diambil tetap akan cenderung berbentuk normal seiring dengan bertambahnya jumlah sampel. Hal ini sejalan dengan pendapat Cahyono (2015) yang menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data dengan jumlah sampel lebih dari 30 ($n > 30$) sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal, dan biasanya disebut sebagai sampel besar. Secara umum, ukuran sampel $n \geq 30$ dianggap cukup untuk mendekati distribusi normal, karena semakin besar jumlah sampel, semakin kecil deviasi terhadap distribusi normal.

Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini mencapai 92 orang, yang jauh lebih besar dari batas minimal 30 sampel yang disyaratkan dalam *Central Limit Theorem*. Oleh karena itu,

pengujian normalitas tidak diperlukan, karena distribusi *error term* dapat diasumsikan sudah mendekati normal. Dengan demikian, analisis dapat langsung berfokus pada uji asumsi klasik lainnya, seperti uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian multikolinieritas dapat dilakukan menggunakan dua indikator, yaitu nilai toleransi dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai toleransi $> 0,1$ dan $VIF < 5$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel bebas dalam model regresi. Jika nilai toleransi $< 0,1$ dan $VIF > 5$, maka mengindikasikan bahwa terdapat multikolinieritas antara variabel bebas dalam model regresi (Hasanah, Mutiasari, dan Hartati, 2021). Uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan software IBM SPSS *Statistic 25*.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah varians *residual* antar pengamatan dalam model regresi sama (homoskedastisitas) atau berbeda (heteroskedastisitas). Model regresi yang ideal adalah yang memenuhi asumsi homoskedastisitas. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji White dengan perangkat lunak Eviews 13. Kesimpulan diambil berdasarkan nilai *p-value chi square*. Jika *p-value chi-square* lebih kecil dari 5 persen, maka terdapat gejala heteroskedastisitas (Gujarati dan Porter, 2009). Jika, terjadi masalah heteroskedastisitas, maka dapat diatasi dengan metode HAC (*Heteroscedasticity and Autocorrelation Consistent*).

Metode HAC (*Heteroscedasticity and Autocorrelation Consistent*) atau Newey–West digunakan untuk mengoreksi *standard error* dalam regresi OLS ketika terdapat heteroskedastisitas dan autokorelasi, tanpa perlu mengubah model seperti pada GLS. Metode ini menghasilkan estimasi yang *robust*, namun hanya valid untuk data dengan jumlah observasi besar karena bersifat asimtotik. Gujarati dan Porter (2009) menggunakan 46 sampel, sementara penelitian ini menggunakan 92 sampel, sehingga metode HAC dapat diterapkan secara valid untuk mengatasi heteroskedastisitas dalam regresi.

B. Pengujian Hipotesis Penelitian

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasinya (R^2) yaitu pengujian untuk mengukur secara terpisah dampak variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Jika (R^2) yang diperoleh mendekati 1 (satu), maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan variasi variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika (R^2) makin mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variasi variabel bebas terhadap variabel terikat.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk uji signifikan model. Uji F ini pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika nilai F hitung $>$ F tabel maka H_0 ditolak, artinya variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, sedangkan jika nilai F hitung $<$ F tabel maka H_0 diterima, artinya variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara satu persatu atau individual. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ pada tingkat kepercayaan 0,01, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara individu dan hipotesis diterima, namun jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara individu dan hipotesis ditolak.

4. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil

Analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan ke empat mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pembiayaan sektor pertanian antara petani padi dan KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional adalah metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pelaksanaan sistem bagi hasil sudah sesuai dengan perjanjian (akad) yang disepakati oleh kedua pihak. Koperasi dan anggota petani menetapkan ketentuan bagi hasil di awal, biasanya dalam bentuk persentase dari pendapatan usahatani padi.

Secara umum, BMT Assyafiiyah Ber-Nas menetapkan persentase bagi hasil sebesar 40:60. Persentase ini bersifat fluktuatif, dengan variasi berbeda-beda antara 20:80, 30:70, dan 50:50, tergantung pada kesepakatan (nisbah) antara koperasi dan anggota. Perbedaan nisbah tersebut ditentukan berdasarkan hasil survei dan kesepakatan bersama, dengan porsi terbesar biasanya diberikan kepada anggota sebagai pengelola dana. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan apakah prinsip keadilan dan transparansi dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* benar-benar diterapkan.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Umum Kabupaten Lampung Tengah

1. Keadaan Geografis

Menurut BPS Kabupaten Lampung Tengah (2023), Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung. Pusat pemerintahan atau Ibukota Lampung Tengah berada di Kecamatan Gunung Sugih. Wilayah Kabupaten Lampung Tengah secara umum berada di dataran rendah. Luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah 4545,5 km². Wilayah Kabupaten Lampung Tengah merupakan daerah agraris yang sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian di sektor pertanian.

Kabupaten Lampung Tengah secara geografis memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Lampung Utara
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran
- c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Barat
- d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Kota Metro

Tahun 2023, wilayah administrasi Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari 28 kecamatan. Kecamatan dengan luas paling besar adalah Kecamatan Bandar Mataram dan kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan Kota Gajah. Kecamatan Kota Gajah merupakan satu kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah yang dijadikan lokasi penelitian. Desa di Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 314 desa (BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2023).

2. Keadaan Demografi

Kabupaten Lampung Tengah memiliki populasi penduduk 1,37 juta jiwa. 698.700 laki-laki, 671.300 perempuan. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Sendang Agung dengan kepadatan penduduk sebesar 122.931 jiwa sedangkan yang terendah yaitu Kecamatan Seputih Surabaya dengan kepadatan penduduk sebesar 18.762 jiwa. Masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah terdiri atas beberapa suku bangsa, baik suku asli Lampung maupun pendatang dari Jawa, Sunda, Bali, dan beberapa suku lainnya. Bahasa Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah yang plural menggunakan berbagai bahasa yaitu, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, dan bahasa setempat yang disebut bahasa Lampung (BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2023).

3. Kondisi Perekonomian

Kabupaten Lampung Tengah memiliki perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang menyumbang sekitar 33,90 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2022. Sektor industri pengolahan dan perdagangan juga berperan signifikan, masing-masing berkontribusi sebesar 22,44 persen dan 11,70 persen.

Pada tahun 2022, PDRB per kapita Kabupaten Lampung Tengah mencapai Rp54,97 juta, meningkat dari Rp50,32 juta pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi kabupaten ini tercatat sebesar 3,07 persen pada tahun yang sama. Angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2022 adalah 10,96 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Lampung. Selain itu, kualitas sumber daya manusia di kabupaten ini cukup baik, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,23 pada tahun 2022, menempatkannya di posisi ke empat tertinggi di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi ekonomi yang signifikan, terutama dalam sektor pertanian dan industri pengolahan.

4. Kondisi Pertanian

Berdasarkan BPS Kabupaten Lampung Tengah (2023) merupakan sentra produksi tanaman pangan di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten dengan produksi padi sawah tertinggi di Provinsi Lampung pada tahun 2023 yaitu sebesar 590.404,99 ribu ton. Produksi ubi kayu Kabupaten Lampung Tengah masih yang tertinggi di Provinsi Lampung yaitu mencapai lebih dari 1 juta ton per tahun. Kabupaten Lampung Tengah juga merupakan salah satu sentra produksi jagung di Provinsi Lampung dengan produksi sebesar 3.280.952 ton pada tahun 2023. Komoditas tanaman pangan lainnya yang dihasilkan di Kabupaten Lampung Tengah diantaranya sawi, bawang merah, kacang Panjang, dan cabai rawit. Kabupaten Lampung Tengah juga merupakan sentra produksi sapi potong di Provinsi Lampung. Pada tahun 2023, populasi sapi potong perorangan di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 249.076 ekor atau sekitar 37,73 persen dari populasi ternak sapi potong di Provinsi Lampung.

5. Keadaan Umum Koperasi

Berdasarkan BPS Kabupaten Lampung Tengah (2023), koperasi di Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 691 unit, mengalami penurunan sebanyak 3 unit dibandingkan tahun 2022. Penurunan jumlah koperasi juga diikuti dengan penurunan pada jumlah anggota koperasi. Pada tahun 2022 total anggota koperasi 48.642 jiwa kemudian menurun menjadi 44.238 jiwa pada tahun 2023.

Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 47, terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan pola syariah dan konvensional. Koperasi simpan pinjam dengan pola konvensional di Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 22 unit. Koperasi simpan pinjam dengan pola syariah di Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 25 unit (BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2023). Kabupaten Lampung Tengah memiliki koperasi yang menduduki peringkat 100 besar di Indonesia pada tahun 2023, yaitu KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional yang terletak di Kecamatan Kota Gajah (KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas, 2023).

B. Keadaan Umum Kecamatan Kota Gajah

1. Keadaan Geografis

Ibukota Kecamatan Kota Gajah terletak di Desa Kota Gajah. Kecamatan Kota Gajah memiliki luas wilayah seluas 45,49 km² terletak pada koordinat antara 105° 32 BT dan 4,97° LS. Kecamatan Kota Gajah memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur
- b. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sugih
- c. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Seputih Raman
- d. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Punggur

Kecamatan Kota Gajah berjarak 14 kilometer dari ibukota Kabupaten Lampung Tengah yaitu Kecamatan Gunung Sugih. Desa di Kecamatan Kota Gajah berjumlah 7 desa dengan wilayah terluas adalah Desa Nambah Rejo dan luas wilayah terkecil adalah Desa Kota Gajah Timur (BPS Kecamatan Kota Gajah, 2023).

2. Keadaan Demografis

Kecamatan Kota Gajah memiliki jumlah penduduk 32.280 jiwa yang terdiri dari 16.292 berjenis kelamin laki-laki, dan 15.988 berjenis kelamin perempuan. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Kota Gajah adalah 790 jiwa/km². Kecamatan Kota Gajah merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa antara lain, Suku Lampung, Suku Jawa, Suku Sunda, dan Suku Bali. Keberagaman suku bangsa tersebut membawa sorak budaya yang beragam namun hubungan sosial kemasyarakatan dapat berjalan beriringan dan saling hormat-menghormati antara satu dengan yang lain (BPS Kecamatan Kota Gajah, 2023).

3. Kondisi Pertanian

Kecamatan Kota Gajah merupakan salah satu sentra produksi padi di Kabupaten Lampung Tengah. Produksi padi di Kecamatan Kota Gajah pada tahun 2023 mencapai 5.917 ton dengan luas panen seluas 1.096 hektar. Kecamatan Kota Gajah pada tahun 2023 memproduksi jagung sebesar 2.166 ton. Kecamatan Kota Gajah juga memproduksi tanaman sayuran dan buah-buahan seperti bawang merah, bawang putih, daun bawang, cabai rawit dan semangka (BPS Kecamatan Kota Gajah, 2023).

4. Keadaan Umum Koperasi

Berdasarkan BPS Kecamatan Kota Gajah (2023), terdapat 5 jenis koperasi di Kecamatan Kota Gajah. Tahun 2023 jenis koperasi yang masih aktif

yaitu 1 unit KUD, 1 unit KOPONTREN, 1 unit KSP, 1 unit KSPPS, dan 1 unit koperasi lainnya.

C. Keadaan Umum KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional

1. Sejarah KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional

KSPPS BMT Assyafiiyah Kotagajah didirikan pada tanggal 3 September 1995, bertempat di Pondok Pesantren Nasional Assyafiiyah Kotagajah dengan nama BMT Assyafi'iyah. Pendirinya dimotori oleh:

- a. Mudhofir aktivis dan praktisi koperasi
- b. Drs. Ali Nurhamid, M.Sc PNS pada kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Tengah
- c. KH, Suhaimi Rais, tokoh agama di Kecamatan Kotagajah
- d. Drs. Ali Yurda Sharbani, PNS Tokoh Agama dan Pemangku Pondok Pesantren Nasional Assyafiiyah Kotagajah

Pada saat peresmian Pondok Pesantren Nasional Assyafiiyah, jamaah pengajian Assyafi'iyah dan pengajian akbar Pondok Pesantren Nasional Assyafiiyah mengadakan kegiatan yang menyisakan dana sebesar Rp800.000. Dana tersebut yang digunakan sebagai modal awal pendirian BMT Assyafiiyah Ber-Nas. Pada tanggal 15-25 November 1995, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) langsung mengundang pelatihan bagi BMT yang ada di Lampung dan berubah menjadi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dibawah naungan PINBUK Lampung.

Pada tahun 1999 pemerintah menggulirkan dana untuk kelompok swadaya masyarakat yang baru dan belum berbadan hukum, termasuk BMT Assyafi'iyah diberi kepercayaan untuk mengelola dana Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPMM). Pada tanggal 15 Maret 1999 resmi mendapatkan status badan hukum koperasi dengan

nomor: 28/BH/KDK.7.2/III/1999, sehingga BMT Assyafiiyah berubah nama menjadi koperasi BMT Assyafi'iyah. Sehubungan dengan adanya peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No.10/Per/M.KUKM/IX/2015 tanggal 23 September 2015, tentang petunjuk pelaksanaan kelembagaan koperasi dari KJKS berubah menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah), maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar, sehingga terbit ketetapan dinas koperasi dan UMKM provinsi Lampung Nomor: 219/PAD/M/KUKM.2/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 KJKS BMT Assyafi'iyah berubah menjadi KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional. KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional berkantor pusat di Jl. Jend. Sudirman No. 9 Kotagajah Timur Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah dengan penampakan gedung kantor yang dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Gedung kantor KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional
Cabang Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah
Sumber: KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas (2024)

2. Visi, Misi dan Budaya Organisasi KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional

a. Visi KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional

Visi KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional adalah menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang sehat, kuat, bermanfaat, mandiri dan islami

b. Misi KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional

Misi KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional adalah:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja
- 2) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syariah
- 3) Menumbuhkembangkan usaha produktif di bidang perdagangan, pertanian, industri dan jasa
- 4) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota dengan efektif, efisien, profesional dan transparan
- 5) Menjalinkan kerja sama usaha dengan berbagai pihak

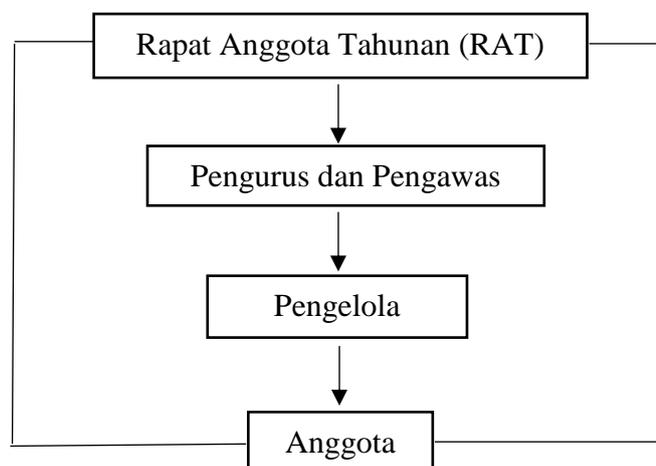
c. Budaya Organisasi KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional

Bekerja dan melayani anggota dengan suasana hati gembira, ikhlas, semangat dan antusias. Slogan dari budaya ini adalah “CERIA” yang berarti:

- 1) *Collaboration*: membangun kebersamaan, bekerjasama dengan saling menjaga, percaya, dan memahami
- 2) *Excellent*: Bekerja dengan antusias dan ikhlas memberi pelayanan terbaik menuju prestasi
- 3) *Respect*: Hormat, peduli dan ramah terhadap anggota
- 4) *Integrity*: Mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan pelayanan serta tata kelola organisasi terbaik
- 5) *Accountability*: Antusias, penuh tanggung jawab dalam bersikap, bekerja dan melayani

3. Bidang Organisasi Koperasi

Struktur organisasi KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Struktur organisasi KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Kabupaten Lampung Tengah
Sumber: KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas (2024)

Berdasarkan Gambar 4, dapat diketahui bahwa struktur organisasi KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 21 tentang perangkat organisasi disebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Susunan kepengurusan dan pengawas KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas masa bakti 2020-2024 berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah sebagai berikut:

A. Pengurus

Ketua Umum : Supadin S.Sos
 Sekretaris : Untung M.M
 Bendahara : Andriyanto S.Pd

B. Pengawas

Ketua : Nur Fauzan S.Pt
 Anggota : Ramadan Habibi L.C

C. Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: Drs. Sugiono
Anggota	: Suraji S.Ag
Anggota	: Mubakir S.Ag

Pengurus kemudian mengangkat pengelola untuk menjalankan operasional KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas yang terdiri dari 8 Kepala Divisi, 6 diantaranya merangkap menjadi manager area, kepala bagian pembiayaan dan karyawan. Pada tahun 2024, karyawan di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas berjumlah 765 orang yang terdiri dari 587 orang laki-laki dan 178 orang wanita. KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas memiliki jumlah cabang sebanyak 45. Pada tahun 2025 jumlah anggota KSPPS BMT Assyafiiyah berjumlah 120.000 anggota.

4. Bidang Usaha KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional

a. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana pada KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas dilakukan dalam bentuk simpanan. Produk simpanan pada KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut (KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas, 2024):

- 1) Simpanan *Mudharabah* adalah simpanan dengan sistem bagi hasil keuntungan yang dihitung saldo rata-rata harian dan diberikan tiap bulan. Pembukaan rekening atas nama perorangan lembaga dengan setoran awal minimal Rp10.000 dan saldo simpanan minimal Rp10.000.
- 2) Simpanan Wadi'ah adalah simpanan yang dinilai sebagai titipan dan tidak berbagi hasil. Simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu.
- 3) Simpanan Qurban adalah simpanan yang dikhususkan untuk keperluan qurban yang pengambilannya menjelang hari raya qurban (idul adha).

- 4) Simpanan Hari Raya adalah simpanan yang dikhususkan untuk keperluan hari raya idul fitri yang pengambilannya menjelang hari raya idul fitri.
- 5) Simpanan Berjangka Syariah yang ditujukan untuk masyarakat muslim yang ingin menginvestasikan dananya untuk kemajuan perekonomian umat melalui sistem bagi hasil yang dikelola secara syariah.

b. Penyaluran Dana

Penyaluran dana yang dilakukan oleh KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas biasa disebut dengan pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah diberikan kepada anggota dengan tujuan penggunaan untuk konsumtif, produktif (pengembangan usaha atau investasi), maupun modal kerja. Pada tahun 2024 KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas menawarkan produk pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan *Mudharabah* adalah untuk investasi usaha, modal sepenuhnya dari KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas. Sistem bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati.
- 2) Pembiayaan *Musyarakah* adalah pembiayaan untuk investasi antara KSPPS BMT Assyafiiyah dengan anggota. masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Pembiayaan *Murabahah* (jual beli) adalah pembiayaan dengan akad jual beli yang dilakukan oleh KSPPS BMT Assyafiiyah dengan anggota/calon anggota sesuai dengan kebutuhan anggota/calon anggota yang besarnya keuntungan ditentukan diawal akad. Cara pembayarannya bisa tunai atau kredit.

c. Layanan *Online*

KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional juga memberikan kemudahan bagi anggotanya dalam bertransaksi secara *online* melalui Aplikasi Ceria Digital. Aplikasi ini semacam *e-banking* yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi secara *online* antara lain:

- 1) Pembayaran tagihan telepon (TELKOM) dan listrik (PLN)
- 2) Pembayaran angsuran (FIF, ACC, AT Finance)
- 3) Pengisian pulsa HP dan listrik (token)
- 4) Transfer bank

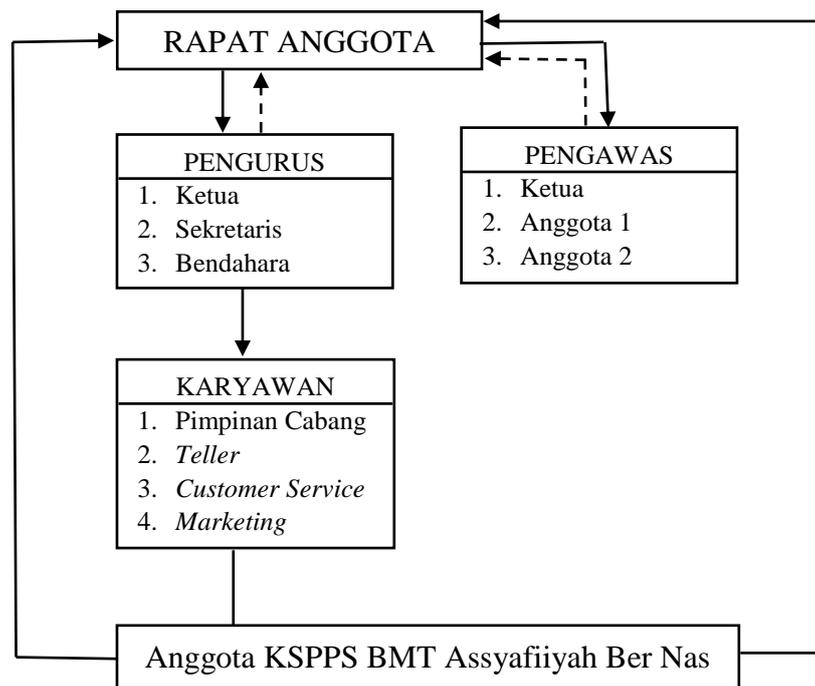
5. Bidang Sosial KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional

KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas memiliki bagian yang secara khusus bertugas menghimpun, mengelola dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dan dana sosial lainnya untuk kesejahteraan umat. Dana yang terhimpun akan disalurkan kepada yang berhak (Mustahiq) sesuai dengan amanah dengan prioritas pada gerakan-gerakan sebagai berikut:

- a) Program pemberdayaan ekonomi umat melalui pemberian pembiayaan Qhardul Hasan/pinjaman kebajikan kepada pedagang kecil produktif.
- b) Bakti sosial melalui donor darah, khitanan masal, dan bedah rumah.
- c) Pemberian santunan bagi Dhuafa dan peduli kemanusiaan. Berbagi bahagia bersama anak yatim/piatu dan dhuafa kepada 1.511 anak di seluruh kantor cabang.
- d) Bantuan dana pendidikan untuk siswa yang kurang mampu melalui Gerakan Orang Tua.

D. Keadaan Umum KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah

KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang memiliki 45 cabang di berbagai daerah, salah satunya berada di Kecamatan Kota Gajah. Cabang ini menjadi yang terbesar dalam hal jumlah anggota, dengan total 11.234 anggota. KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah berperan sebagai penopang keuangan bagi cabang lain, yaitu ketika ada cabang yang mengalami kekurangan dana, Cabang Kota Gajah sering memberikan dukungan finansial agar operasional tetap berjalan lancar. Struktur organisasi KSPPS BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Struktur organisasi KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah

Sumber: KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah (2024)

Keterangan:

- : Garis Koordinasi
 ————— : Garis Komando

KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas memiliki 7 karyawan dengan posisi atau jabatan masing-masing. Pembagian posisi di koperasi tersebut terdiri dari:

- a. Kepala Cabang : Musbikhin Dzikrullah S.E
- b. *Teller* : Devi Riska Amela S.E
- c. *Customer Service* : Indi Dwi Zulianti S.E
- d. *Marketing* :1. Ahmad S.E
2. Taufik S.E
3. Ibnu S.Pd
4. Dedi Sumantri A.Md

Berikut pembagian tugas posisi masing-masing karyawan KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas:

1. Kepala Cabang, yaitu seorang karyawan yang memiliki kewajiban dan wewenang tertinggi di dalam kantor cabang sehingga dapat mengatur penuh seluruh kegiatan di kantor demi tujuan koperasi. Tugas kepala cabang adalah mengoordinasi, mengawasi, memimpin, dan bertanggung jawab seluruh kegiatan operasional di kantor cabang.
2. *Teller*, yaitu karyawan yang memiliki tugas untuk melayani anggota koperasi yang ingin melakukan transaksi dengan koperasi. *Teller* merupakan salah satu jabatan yang berfungsi sebagai pelaksana kegiatan transaksi keuangan tunai dengan anggota.
3. *Customer Service*, yaitu karyawan yang bertugas memberikan pelayanan dan informasi kepada anggota koperasi terkait produk dan layanan yang tersedia. *Customer service* juga berperan dalam menangani pertanyaan, keluhan, serta membantu proses administrasi keanggotaan agar anggota mendapatkan pelayanan yang optimal.
4. *Marketing*, yaitu karyawan yang memiliki tugas untuk mempromosikan koperasi tersebut agar dikenal masyarakat luas. Selain itu, bagian marketing juga bertugas untuk mengelola hubungan dengan anggota koperasi serta mengidentifikasi peluang pemasaran dan pengembangan anggota baru.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas pemanfaatan pembiayaan pada sektor pertanian di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah tergolong efektif hingga sangat efektif. Rata-rata pemanfaatan pembiayaan mencapai 80,7 persen pada skema *mudharabah* dan 79,8 persen pada skema *musyarakah*, yang mencakup pembiayaan untuk kebutuhan pertanian seperti benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, olah tanah, dan panen. Namun demikian, masih terdapat alokasi dana yang digunakan di luar tujuan pertanian, masing-masing sebesar 19,3 persen pada *mudharabah* dan 20,2 persen pada *musyarakah*. Hal ini mengindikasikan adanya *moral hazard*, dimana sebagian petani tidak sepenuhnya menggunakan dana pembiayaan untuk kegiatan usahatani padi.
2. Pendapatan atas biaya tunai usahatani padi MT 1 pada pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp44.003.850,06 dan pendapatan atas biaya total usahatani padi MT 1 pada pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp35.364.207,09. Pendapatan atas biaya tunai usahatani padi MT 1 pada pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp41.580.061,91 dan pendapatan atas biaya total usahatani padi MT 1 pada pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp33.366.284,89. Nilai R/C atas biaya total adalah sebesar 2,31 pada pembiayaan *mudharabah* dan 2,34 pada pembiayaan *musyarakah*, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan usahatani padi dengan

pembiayaan dari KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah menguntungkan dan layak untuk dilanjutkan.

3. Efektivitas pemanfaatan pembiayaan sektor pertanian berpengaruh positif terhadap pendapatan usahatani padi, sedangkan variabel jenis pembiayaan tidak berpengaruh terhadap pendapatan usahatani padi di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.
4. Pelaksanaan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah telah berjalan sistematis sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Penetapan porsi bagi hasil bersifat fleksibel, yang merupakan hasil kesepakatan antara KSPPS dengan anggota. Hasil perbandingan menunjukkan adanya perbedaan antara pendapatan usahatani padi hasil analisis pada penelitian ini dengan pendapatan yang dilaporkan oleh anggota kepada KSPPS, karena masih dilaporkan secara lisan. Oleh karena itu, KSPPS sebaiknya meminta laporan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan terkait biaya, produksi, dan penerimaan hasil.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah:

1. KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah disarankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan teknis seperti monitoring langsung ke lapangan, pemberian edukasi kepada anggota terkait prinsip dan akad syariah, serta penerapan sistem pelaporan yang didukung bukti transaksi dalam upaya meningkatkan efektivitas pemanfaatan pembiayaan oleh petani.
2. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Tengah, diharapkan lebih aktif mendukung KSPPS BMT Assyafiiyah Ber-Nas Cabang Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah melalui pembinaan kepada pengurus, pengelola, dan anggota koperasi terkait penggunaan pembiayaan guna mencegah terjadinya *moral hazard*.

3. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, diharapkan dapat memperbaiki mekanisme penggunaan pupuk sehingga penyaluran pupuk bersubsidi yang dibutuhkan oleh petani dapat dilakukan secara tepat waktu dan tepat jumlah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian serupa pada lembaga keuangan atau koperasi syariah yang berbeda agar hasil penelitian lebih beragam dan dapat dibandingkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, S., Baruwadi, M. H., dan Halid, A. 2022. Analisis kelayakan usahatani jagung di Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. *AGRINESIA: Jurnal Ilmiah Agribisnis*. 7(1), 60–66.
DOI:<https://doi.org/10.37046/agr.v7i1.18957>.
- Afifudin, A. 2018. Monopoli bisnis koperasi simpan pinjam di tinjau dari Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. *Jurnal Usm Law Review*. 1(1), 106–126. DOI: <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2235>.
- Afrianty, N., Isnaini, D., dan Oktarina, A. 2020. *Lembaga Keuangan Syariah*. CV Zigie Utama. Bengkulu.
- Alamsyah, Z. 2015. Penguatan kelembagaan dan permodalan petani. *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis ke-52 Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya*. Palembang.
- Alwasilah, A. C. 2015. *Pokoknya Studi Kasus Pendekatan Kualitatif*. PT Dunia Pustaka Jaya. Bandung.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Arlina, A. M., Yazid, M., dan Hidayat, A. A. 2023. Prinsip manajemen pembiayaan lembaga non Bank Syariah (studi kasus KSPPS BMT Khoiru Ummah Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 9(3), 4451–4458.
DOI:<https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9712>.
- Asmirawati dan Sumarlin. 2018. Perilaku *Moral Hazard* Nasabah pada Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*. 5(1), 121-145. DOI: <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v5i1.4992>.
- Astutik, D. V., dan Suliyono. 2023. Pemanfaatan pembiayaan perbankan syariah dalam meningkatkan produktivitas usaha *home* industri romli. *Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah*. 6(2), 92–102.
DOI: <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v6i2.504>.

- Atin, T. D. N. 2019. Pengaruh efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap peningkatan profit usaha mikro (studi kasus pada nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta). *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*. 8(1), 10–19.
DOI:<https://journal.student.uny.ac.id/ekonomi/article/view/13028/12586>.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2021. *Statistik Penelitian dan Pengembangan Pertanian*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2023. *Struktur Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2024. Luas Panen dan Produksi di Indonesia dalam angka 2024. Publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2019. Provinsi Lampung dalam Angka 2020. Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- _____. 2020. Provinsi Lampung dalam Angka 2021. Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- _____. 2021. Provinsi Lampung dalam Angka 2022. Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- _____. 2022. Provinsi Lampung dalam Angka 2023. Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- _____. 2023. Provinsi Lampung dalam Angka 2024. Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah. 2023. Kabupaten Lampung Tengah dalam Angka 2024. Publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah.
- Badan Pusat Statistik Kecamatan Kota Gajah. 2023. Kecamatan Kota Gajah dalam Angka 2024. Publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah.
- Bardi, S. 2017. *Demografi Umum*. PeNA. Banda Aceh.
- Cahyadi, Y., dan Windirah, N. 2021. Efektivitas program KUR mikro untuk UMKM di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bangkahulu. *Jurnal Agristan*. 3(1), 54–70. DOI: <https://doi.org/10.37058/ja.v3i1.3118>.

- Cahyani, A. R., Haryono, D., dan Marlina, L. 2023. Analisis pendapatan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani kubis di Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*. 11(1), 48. DOI:<https://doi.org/10.23960/jiia.v11i1.623>.
- Cahyani, M. P. G., Prayoga, K., dan Prasetyo, A. S. 2022. Motivasi petani dalam penggunaan jasa koperasi serba usaha petani hijau *farmers motivation*. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*. 8(2), 1141–1158. DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/ma.v8i2.7783>.
- Cahyono, T. 2015. *Statistik Uji Normalitas*. Yayasan Sanitarian Banyumas. Purwokerto.
- Damanik, T. R., Sihombing, L., dan Lubis, S. N. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual gabah petani di Serdang Bedagai (studi kasus: Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan). *Journal on Social Economic of Agriculture and Agribusiness*. 2(6), 1–7.
- Damayanti, E. 2016. Perbandingan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bank syariah dan bank konvensional (studi kasus pada bank syariah mandiri dan bank mandiri). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*. 3(2). DOI: <https://doi.org/10.35137/jabk.v3i2.70>.
- Damayanti, L. 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, pendapatan dan kesempatan kerja pada usaha tani padi sawah di Daerah Irigasi Parigi Moutong. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*. 9(2):249-259. DOI: <https://doi.org/10.20961/sepa.v9i2.48831>.
- Dwirayani, D., dan Jaeroni, A. 2020. Efektivitas pembiayaan agribisnis mangga (*Mangifera Indica L.*) (Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia studi kasus di Desa Gemulung Tonggoh Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon). *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*. 4(4), 808–815. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2020.0004.04.1>.
- Fadlillah, M. N., dan Khotijah, S. A. 2021. Efektivitas penerapan pembiayaan *musyarakah* pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Bima Kota Magelang. *Jurnal Akuntansi Syariah*. 4(2), 227–240. DOI:<https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11951>.
- Fauziyyah, A., Suhada, A., Nurjanah, A., dan Utama, R. E. 2023. Jenis-jenis koperasi dan koperasi sebagai badan usaha. *Jurnal Musytari: Neraca Manajemen Ekonomi*. 3(4), 76-86. DOI: <https://doi.org/10.8734/musyitari.v3i4.1719>.
- Fuadi, F. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori dan Aplikasi)*. CV. Adanu Abimata. Jawa Barat.

- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gujarati, D. N., dan Porter, D. C. 2009. *Basic Econometrics*. McGraw Hill. New York.
- Gustati, V. W. 2017. Determinan penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan SKPD. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*. 2(2), 91–106. DOI: <https://doi.org/10.18382/jraam.v2i1.69>.
- Hamonangan. 2020. Analisis penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padang Sidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*. 4(2), 454-466. DOI: <https://doi.org/10.31955/mea.v4i2.518>.
- Hasanah, N., Mutiasari., dan Hartati, S. 2021. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*. 4(1), 53-67. DOI: <https://doi.org/10.52802/amn.v4i1.91>.
- Hermawan, S., dan Amirullah. 2016. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Media Nusa Creative. Malang.
- Indika, M., dan Marliza, Y. 2019. Upaya pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam mengatasi kemiskinan di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. *MBIA*. 18(3), 49–66. DOI: <https://www.academia.edu/download/91902263/395.pdf>.
- Kartini, T. 2019. Pengaruh sistem pembiayaan *mudharabah* terhadap efektivitas UMKM. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*. 7(14), 68-79. DOI: <https://doi.org/10.37150/jiie.v7i14.387>.
- Kasimin, S. 2013. Keterkaitan produk dan pelaku dalam pengembangan agribisnis hortikultura unggulan di Provinsi Aceh. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*. 10(2), 117-127.
- Kementerian Pertanian. (2024). *Statistik Harga Komoditas pertanian 2024*. https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/BUKU_STATISTIK_HARGA_KOMODITAS_PERTANIAN_TAHUN_2024_VINAL.pdf.
- Kusumastuti, A., Khoiron, A. M., Achmadi, T. A. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Deepublish. Yogyakarta.
- Lestari, dan Astuti. 2019. *Moral Hazard* dalam Pembiayaan Sistem Bagi Hasil (*Mudharabah dan Musyarakah*) pada BPRS. *Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*. 2(2), 21-38.

- Lubis, S. 2021. Efektivitas pembiayaan agribisnis BPRS dalam meningkatkan pendapatan hasil pertanian nasabah di Kabupaten Serdang Bedagai (studi kasus pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam*. 1(2), 1–13. DOI:<https://jurnal.mahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimpai/article/view/205/df>.
- Mahjali, S. 2012. Sistem agribisnis usahatani cabai merah (*capsicum annum*). *Jurnal STEVIA* Vol 2(1).
https://www.academia.edu/download/54348724/6_021415_Sistem_Agribisnis_Usahatani_Cabai_Merah_Capsicum_annum_-_Said_Mahjali_Stevia_Vol.II_No_.01_Jan_12_.pdf
- Mangowal, J. 2013. Pemberdayaan masyarakat petani dalam meningkatkan pengembangan ekonomi pedesaan di Desa Tumani Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*. 5(1), 90–98.
DOI:<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/1481>.
- Mardani, 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Prenada Media. Jakarta.
- Maulidah, S. 2012. *Pengantar Manajemen Agribisnis*. Universitas Brawijaya Press. Malang.
- Maulidi, R. A., dan Rahman, H. 2021. Efektivitas pembiayaan akad *mudharabah* BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam solusi pemulihan ekonomi masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 1(2), 72–78.
DOI:<https://doi.org/10.56393/investasi.v1i2.195>.
- Muljono, D. 2012. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mulyakin, T., Astuti, Y., Haryani, D. 2016. Faktor yang mempengaruhi petani padi dalam pemanfaatan sumber permodalan: studi kasus di Kabupaten Serang Provinsi Banten. *Jurnal BPTP*. DOI:10.13140/RG.2.2.15776.17921.
- Mongkito, A. W., Putra, T. W., Imran, M., Novita, K., dan Ansar, A. N. 2021. Implementasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro syariah dalam pengembangan usaha mikro. *Robust: Research of Business and Economics Studies*. 1(1), 91. DOI: <https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886>.
- Naheri, Adawiyah, R., Masse, R. A. 2024. Strategi pengembangan *baitul mal wat tamwil* sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi usaha mikro, kecil dan menengah. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*. 1(2), 238-247. DOI: <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.376>.

- Nurmastiti, A., dan Wianto, A. O. 2024. Hubungan karakteristik petani terhadap tingkat penerapan budidaya padi organik di Kabupaten Karanganyar. *AGRITECH: Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian*. XXVI(1). DOI: <https://doi.org/10.30595/agritech.v26i1.22475>.
- Nurnasrina, dan Putra, P. A. 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Cahaya Pirdaus. Pekanbaru.
- Ompusunggu, D. P., Sutrisno, D. R. I., dan Hukom, A. 2023. Konsistensi dan efektivitas peran lembaga keuangan non bank (koperasi simpan pinjam) sebagai penggerak perekonomian Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*. 4(1), 378–385. DOI: <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i1.1449>.
- Paloma, C., Yusmarni, Utami, A. S., dan Hasnah. 2020. Pengaruh aksesibilitas pembiayaan terhadap pendapatan petani kopi di Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*. 19(2), 301–314. DOI: <https://doi.org/10.31186/jagrisep.19.2.301-314>.
- Pambudy, R. 2020. *Kewirausahaan Agribisnis*. IPB Press. Bogor.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Perkasa, R. D., dan Siregar, A. A. 2023. Analisis peran koperasi simpan pinjam cinta kasih terhadap upaya mensejahterakan masyarakat medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 7 (2), 14336–14342. DOI: <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.8670>.
- Prasetyo, Y., dan Supriyanto. 2022. Efektifitas Pembiayaan sektor agribisnis dalam meningkatkan pendapatan petani di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali (studi kasus Bank Jateng Syariah Cabang Boyolali). *Indonesian Scientific Journal of Islamic Finance*. 1(1), 43–63. DOI: <https://doi.org/10.21093/inasjif.v1i1.4785>.
- Prastami, D. A., Abubakar, dan Afifah, L. 2021. Analisis pendapatan usahatani padi pada program petani makmur di Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang. *Journal of Agribusiness Science*. 9(2), 294–300. DOI: <http://dx.doi.org/10.23960/jiia.v11i2.7042>.
- Primyastanto, M. 2011. *Manajemen Agribisnis antara Teori dan Aplikasinya*. Universitas Brawijaya Press. Malang.
- Priyatno, D. 2013. *Mandiri Belajar Analisis Data dengan SPSS (Untuk Pemula)*. Mediakom. Yogyakarta.
- Rachmina, D. 2015. *Evolusi Pendidikan Tinggi Agribisnis Indonesia*. Departemen Agribisnis. Bogor.

- Rofiah, C. 2023. *Metode Penelitian Studi Kasus*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. Malang.
- Rufaidah, E. 2017. Pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui koperasi unit desa berbasis usaha terbimbing. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*. 22(2), 361–374. DOI: <https://doi.org/10.32332/akademika.v22i2.824>.
- Sadarudin, W., Baruwadi, M., dan Murtisari, A. 2017. Analisis pendapatan usahatani bawang merah di Desa Lenyek Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai. *Jurnal Agronesia*. 2(1), 17–26. DOI: <https://doi.org/10.37046/agr.v2i1.2435>.
- Saefudin. 2023. Strategi perencanaan menghadapi krisis pangan dan el nino. *Jurnal Warta BSIP Perkebunan*. 1(3), 21–30. DOI: <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/wartabun/article/view/3457>.
- Saragih, B. 2010. *Suara dari Bogor: Membangun Opini Sistem Agribisnis*. IPB Press. Bogor.
- Sari, D. P., dan Suciati, L. P. 2018. Sikap petani terhadap penggunaan benih padi varietas unggul di Kabupaten Jember. *UNJ e-Proceeding*. DOI: <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/8967>.
- Sastraatmadja, E. 2010. *Suara petani*. Masyarakat Geografi Indonesia. Bandung.
- Simanjuntak, M. C. 2018. Analisis usaha ternak ayam broiler di peternakan ayam selama satu kali masa produksi. *Jurnal Fapertanak*. 3(1), 60–81.
- Subhaktiyasa, P. G. 2024. Menentukan populasi dan sampel: pendekatan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*. 9(4), 2721-2731. DOI: 10.29303/jipp.v9i4.2657.
- Sukmayanto, M., Hasanuddin, T., dan Listiana, I. 2022. Analisis produksi dan pendapatan usahatani padi di Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*. 6(2), 625–634. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2022.006.02.26>.
- Sumantri, B. A., dan Permana, E. P., 2017. *Manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Kediri.
- Sundayana, R. F. 2018. Efektivitas pelaksanaan program pertanian oleh penyuluh pertanian dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 4(4), 103–113. DOI: [http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v4i4.1809 %0A](http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v4i4.1809%0A).

- Sunyoto, D. 2012. *Konsep Dasar Riset Pemasaran Dan Perilaku Konsumen*. CAPS. Yogyakarta.
- Supriyono, M. 2011. *Buku Pintar Perbankan*. CV. Andi OFFSET. Yogyakarta.
- Suratiyah, K. 2015. *Ilmu Usahatani*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Susanti, R. 2005. *Sampling dalam Penelitian Pendidikan*. Teknologi Pendidikan. Jakarta.
- Suyono. 2018. *Analisis Regresi untuk Penelitian*. Deepublish. Yogyakarta.
- Tambunan, V. P., Lestari, D. A. H., Prasmatiwi, F. E. 2022. Analisis efisiensi produksi dan pendapatan usahatani padi sawah di Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*. 10(3), 306-312. DOI: <http://dx.doi.org/10.23960/jiia.v10i3.6147>.
- Triana, A., Haryono, D., dan Hasanuddin, T. 2020. Analisis Pendapatan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga petani (kasus petani padi organik dan anorganik di Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu). *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*. 8(4), 555. DOI: <https://doi.org/10.23960/jiia.v8i4.4698>.
- Triatmoko, E., dan Fitriadi, S. 2020. Produktivitas dan pendapatan usahatani padi lokal varietas mayang di Desa Malintang Lama Kabupaten Banjar P. *Jurnal Ziraa'Ah*. 45(3), 254-261. DOI: <https://doi.org/10.31602/zmip.v45i3.3035>.
- Triyuda, A. B., Afifah, R., dan Azqmi, U. 2024. Dampak kebijakan agraria terhadap ketahanan pangan di Berau Kecamatan Taliyasan. *Journal of Economic and Economic Policy*. 1(2), 172–186. DOI: <https://doi.org/10.61796/ijecep.v1i2.26>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Virgiana, S., Arifin, B., dan Suryani, A. 2019. Sistem agribisnis jagung di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*. 7(4), 458–465. DOI: <https://doi.org/10.23960/jiia.v7i4.3860>.
- Wahyuningsih, Y. M., dan Baparki. 2020. Analisis efisiensi tenaga kerja usahatani padi (*oryza sativa L*) pada lahan kering dengan cara tanam jajar legowo di Desa Sungai Lurus. *Ziraa'ah Majalah Ilmiah Pertanian*. 43(3), 354-360. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/zmip.v45i3.3479>.

- Wiwoho, J. 2014. Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan distribusi keadilan bagi masyarakat. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. 43(1), 87–97.
DOI:<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9028/7333>.
- Yanti, M., Usman, U. 2020. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani padi wanita di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ekonomi Pertanian Unimal*. 3(1).
DOI: <https://doi.org/10.29103/jepu.v3i1.3175>.
- Yasmin, A. A., Lestari, D. A. H., dan Affandi, M. I. 2019. Strategi pengembangan koperasi lembaga keuangan mikro agribisnis (LKM-A) Gapoktan Sari Makmur Kecamatan Metro Timur Kota Metro. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*. 7(1), 83. DOI: <https://doi.org/10.23960/jiia.v7i1.83-90>.
- Yoko, B. 2016. Analisis permintaan pembiayaan pertanian syariah untuk usahatani padi di Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Bisnis Tani*. DOI:<https://doi.org/10.35308/jbt.v2i1.532>.
- Yusriadi, dan Irwan. I. N. P. 2022. *Modul Ilmu Usaha Tani*. Deepublish. Yogyakarta.